

**KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM
MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

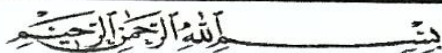
*Diajukan guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Tomy Puji Setiawan
NPM : 1505180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : TOMY PUJI SETIAWAN
NPM : 1505180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

Penguji II

(MURVIANA KOTO, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : TOMY PUJI SETIAWAN
N.P.M : 1505180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM
MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA
DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si

*Lembaran Ini Kupersembahkan khusus untuk kedua orang
tuaku (Ayah dan Ibu) tersayang*

Doa Untuk Ayah dan Ibu

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

*Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku),
dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”*

Syair untuk Ayah Ibu

Teruntukmu ayah
Yang selalu bersusah payah
Bekerja tak kenal lelah
Mengeluh pun juga tak pernah

Maafkan diriku sebagai anak
Aku berjanji niscaya kelak
Berbakti untuk bergerak
Melalui semangat yang bergejolak

Untuk ibuku tersayang
Yang setiap pagi berjuang
Memberikan kasih sayang
Meski kami bangkit siang

Mengajari kami tak kenal henti
Separuh jiwa sepenuh hati
Jadikan kami manusia berbudi
Menjadi baik kami berjanji

Kepada ayah ibu tercinta
Janji kami ucapkan setia
Pengorbanan penuh segala
kan kami balas semua

Tuhan berikan kami kekuatan
Ubah niat jadi perbuatan
Untuk balas pengorbanan
Ayah ibu kami sekalian

Jadikan mereka penuh bahagia
Dengan segala daya upaya
Di seluruh sisa usianya
Hingga nanti sampai ke surga

ABSTRAK

Topik ini diangkat berdasarkan berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi khususnya pada sektor ekonomi pariwisata Indonesia sejak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan ke 169 negara. Serta seberapa besar pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan terhadap perkembangan sektor ekonomi pariwisata di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata dan analisa komparatif dengan teknik uji beda dalam melihat arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Dimana data yang dihimpun adalah data jumlah wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata di Indonesia sebanyak 6 tahun, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Berdasarkan hasil uji komparatif dengan teknik uji beda menggunakan *software* SPSS 16, menunjukkan hasil bahwa kebijakan BVK berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wisatawan mancanegara dengan nilai Sig sebesar 0,050, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai Sig sebesar 0,018. Sedangkan pada rata-rata lama menginap tamu asing dengan nilai Sig sebesar 0,423, penerimaan devisa dari sektor pariwisata dengan nilai Sig sebesar 0,077, pertumbuhan restoran dengan nilai Sig sebesar 0,863, serta jumlah akomodasi dengan nilai Sig sebesar 0,194 tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci: *BVK, Wisatawan Mancanegara, Lama Menginap, Devisa, PNBP, Pertumbuhan Restoran, Akomodasi*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata di Indonesia”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ayahanda tercinta Irwansyah Tambunan serta ibunda saya tercinta Puji Astuti, adik saya yang saya sayangi Rio Puji Firmansyah, dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangat yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. HJ. Lailan Safina Hsb, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada teman dekat saya Farah Dina yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya (Zeid dan Putra) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
11. Kepada seluruh teman-teman dari Ekonomi Pembangunan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Tomy Puji Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	17
1.3 Batasan Dan Rumusan Masalah	17
1.3.1 Batasan Masalah.....	17
1.3.2 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan Penelitian	18
1.5 Manfaat	18
1.5.1 Manfaat Akademik	18
1.5.2 Manfaat Non-Akademik.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Uraian Teoritis	20
2.1.1 Pendapatan Nasional	20
2.1.2 Penerimaan Negara	24
2.1.3 Pariwisata	29
2.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	40
2.3 Penelitian Terdahulu	43
2.4 Kerangka konseptual	45
2.5 Hipotesa	46

BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Definisi Operasional	47
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	49
3.7 Tahapan Analisis	50
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Data	54
4.1.1 Pariwisata di Indonesia.....	54
4.1.2 Perkembangan Arus Wisatawan Mancanegara Pasca Diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.....	65
4.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi yang Mendukung Pariwisata Pasca Diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	69
4.2 Hasil Analisis Komparatif	77
4.3 Pembahasan	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1-1	Penerimaan Devisa Indonesia Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2014 Sampai Tahun 2016 (Juta US\$).....	9
Tabel 1-2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017	10
Tabel 1-3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia Tahun 2014-2016.....	13
Tabel 1-4	Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel bintang dan non Bintang tahun 2013-2015.....	13
Tabel 1-5	Data Jumlah Akomodasi Tahun 2014-2016.....	14
Tabel 1-6	Pertumbuhan Usaha Restoran dan Kafe di Indonesia Tahun 2014-2016.....	14
Tabel 1-7	Data PNBPN, 2014-2016 (miliar rupiah)	15
Tabel 1-8	Data Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2014 sampai 2015	16
Tabel 2-1	Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan	41
Tabel 2-2	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3-1	Definisi Operasional	48
Tabel 4-1	Realisasi Jumlah Wisatawan Mancanegara Pasca Diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan	65
Tabel 4-2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	71
Tabel 4-3	Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara	78
Tabel 4-4	Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang	80
Tabel 4-5	Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	81

Tabel 4-6 Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Devisa Pariwisata Indonesia	83
Tabel 4-7 Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Pertumbuhan Restoran	85
Tabel 4-8 Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Akomodasi di Indonesia	89

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 2-1 Bagan Konseptual	45
Gambar 2-2 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4-1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Danau Toba	55
Gambar 4-2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bangka Belitung	56
Gambar 4-3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pantai Tanjung Lesung	57
Gambar 4-4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kep. Seribu	58
Gambar 4-5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Candi Borobudur	59
Gambar 4-6 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	60
Gambar 4-7 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Mandalika	61
Gambar 4-8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Labuan Bajo	62
Gambar 4-9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pulau Morotai	63
Gambar 4-10 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke taman Nasional Wakatobi	64
Gambar 4-11 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Indonesia Tahun 2015 sampai Tahun 2017	66
Gambar 4-12 Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang	70
Gambar 4-13 Penerimaan Devisa Pariwisata Indonesia	73
Gambar 4-14 Laju Pertumbuhan Usaha Restoran di Indonesia	75
Gambar 4-15 Perkembangan Penyediaan Akomodasi di Indonesia	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Kreatif di berbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Munculnya istilah ekonomi kreatif telah membangunkan negara-negara diseluruh benua untuk menggali dan mengembangkan potensi kreatifitas yang dimiliki masing-masing negara. Industri kreatif ini perlu dikembangkan karena memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya, seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, mendukung pemanfaatan sumber daya yang terbarukan, merupakan sarana atau wadah untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa, dan memiliki dampak sosial yang positif.

Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena Bangsa Indonesia memiliki sumberdaya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Sebagai langkah nyata dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian bangsa di Indonesia maka Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009-2015. Untuk itu dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan diperlukan pengembangan ekonomi kreatif guna mengatasi jumlah kemiskinan agar tidak semakin bertambah, dimana pengembangan ekonomi kreatif ini dipengaruhi oleh

perkembangan industri-industri kreatif di tanah air. Bukti nyata lainnya adalah dimana pemerintah juga telah melakukan kajian awal untuk memetakan kontribusi ekonomi dari industri kreatif yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif.

Indonesia memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan asing, namun saat ini wisatawan asing masih lebih memilih lokasi di negara lain di Asia. Dalam hal ini industri kreatif yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif dapat memberikan peran yang sangat luas dalam memperbaiki citra pariwisata nasional, dimana pondasi dari industri kreatif itu sendiri adalah para pekerja kreatif yang memiliki peranan dalam menciptakan kandungan atau konten yang berbasis budaya. Selain itu dari sisi karakter bangsa, pembangunan yang terarah di sektor industri kreatif berbasis budaya dapat menciptakan landasan karakter budaya lokal yang kuat. Untuk itu, pembangunan industri kreatif di Indonesia harus dilandasi oleh warisan budaya lokal dan pembangunan SDM yang terampil, terlatih, dan terberdayakan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas serta kebudayaan Indonesia. Di sisi lain, pembangunan industri kreatif yang mengangkat warisan budaya lokal ini diharapkan dapat menciptakan kreasi baru sehingga masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional dapat lebih mengapresiasi warisan budaya Indonesia.

Pariwisata dan ekonomi kreatif saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu : pertama, *something to see*; Kedua *something to do*; dan ketiga *something to buy*. *Something to see* terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, *something to do* terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah tujuan wisata, dan *something to buy* terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah tujuan

wisata sebagai memorabilia pribadi wisatawan. Dalam ketiga komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui *something to buy* dengan menciptakan produk-produk inovatif khas suatu daerah tujuan wisata. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata memerlukan sinergi antar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu pemerintah, cendekiawan, dan sektor swasta (bisnis).

Secara umum pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Memasuki era globalisasi peranan industri pariwisata harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.

Wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim yang memunculkan beraneka ragam flora dan fauna yang mempesona para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang berupa hutan hujan tropis, gunung, pantai, dan juga lautan serta keanekaragaman budaya yang merupakan modal dasar yang sangat potensial untuk di jadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang terkenal di dunia. Dilatar belakangi oleh keindahan alam dan keanekaragaman budaya, menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terkenal akan objek wisata, baik itu objek wisata alam maupun objek wisata budaya. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup para pelaku wisata, pendapatan dari objek-objek wisata juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pemerintah daerah khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya. Untuk kelancaran pengembangan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting antara lain seperti jalan yang baik, transportasi darat, laut,

udara, dan akomodasi sebagai sarana yang tak kalah pentingnya dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancong, turisme (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:830). "*pariwisata*" diidentikkan dengan kata "*travel*" dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Sinaga, 2010). Pengembangan Suatu tempat yang dijadikan daerah pariwisata diharapkan menjadi sumber dan potensi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pembangunan berbagai potensi kepariwisataan nasional, dengan tetap memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup.

Sektor pariwisata merupakan alternatif pemasukan pendapatan bagi devisa negara, bahkan bagi negara-negara maju sekalipun pariwisata serius untuk dikembangkan. Terkait dengan hal itu, dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sektor pariwisata tersendiri di Indonesia, adalah sektor yang menjanjikan. Sektor pariwisata nasional kini menjadi primadona baru bagi pembangunan nasional. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor ini amat signifikan bagi devisa negara.

Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Semakin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka. Sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata dimasa yang akan datang(Edge1, 2008).

Langkah untuk mendorong kepariwisataan, banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti Peningkatan kualitas dan akses destinasi pariwisata, Penguatan data dan informasi, Peningkatan akses pembiayaan, Intensifikasi layanan sistem pembayaran digital, Penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Penguatan akses/konektivitas darat dan udara, Pengembangan atraksi yang terintegrasi, Peningkatan amenities, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Peningkatan kualitas dan akses destinasi pariwisata membutuhkan kerjasama antarnegara atau hubungan internasional untuk merealisasikannya. Hubungan internasional terjalin karena adanya saling ketergantungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau kerja sama dengan negara lain. Secara defisional, hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan antarbangsa, atau sebagai hubungan global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Hubungan internasional juga sering diistilahkan hubungan antarnegara untuk menandai semua hubungan itu (Sitepu, 2011). Ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian hubungan internasional antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa. Dalam hubungan tersebut berkembang juga kebiasaan-kebiasaan maupun peraturan-peraturan hukum yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama.

3. Menurut Teuku May possibly Rudi Hubungan internasional mencakup bermacam rupa hubungan ataupun interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan.

Berdasarkan konsep hubungan internasional di atas, Pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang menunjukkan kerjasama antarnegara. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan visa. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Sejak pertengahan tahun 2015 pemerintah melakukan suatu kebijakan besar yang dinilai dapat memberi dampak yang besar terhadap kiprah pariwisata Indonesia di mata dunia. Presiden RI Joko Widodo pada bulan Juni 2015 mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian,

kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan denganditandatangani Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21 /2016 (169 negara).

Berdasarkan Perpres No. 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka 2). Dengan diresmikannya Perpres ini, berarti Indonesia telah memberlakukan bebas visa bagi 45 negara. Pada tahun 2016, kebijakan ini diperluas hingga ke 169 negara. Adapun jumlah negara yang diberikan bebas visa berdasarkan Benua yaitu, Benua Eropa sebanyak 52 negara, Benua Asia 42 negara, Benua Amerika 23 negara, Benua Australia 18 negara, dan Benua Afrika 34 negara. Tujuan dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut yaitu untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan sebesar 20 juta wisatawan pada tahun 2019.

Berdasarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tersebut, diperkirakan pada tahun 2019 penerimaan devisa pariwisata mampu mengalahkan pemasukan devisa dari industri kelapa sawit (CPO). Terlihat pada tahun 2015

bahwa penerimaan devisa pariwisata meningkat meskipun posisinya tetap, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1-1
Penerimaan Devisa Indonesia Berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2014 Sampai Tahun 2016 (Juta US\$)

No	Jenis komoditi	2014	2015	2016
1	Minyak & Gas Bumi	30,318.8	18,574.4	10,752.2
2	Batu Bara	20,819.3	14,717.9	10,109.9
3	CPO	17,464.9	16,427.0	12,136.1
4	Pariwisata	11,166.1	12,225.9	10,134.8
5	Pakaian jadi	7,450.9	6,410.9	5,118.6
6	Karet Remah	7,021.7	3,564.1	2,591.5
7	Barang Perhiasan & Barang Berharga	6,486.8	3,319.9	3,854.3
8	Peralatan Listrik	6,529.1	4,510.4	3,784.2
9	Benang Pintal	5,379.7	1,927.6	1,558.7
10	Furniture & Kayu	3,914.1	1,352.2	1,055.6
11	Bahan Kimia	3,853.7	3,174.0	2,934.6
12	Kertas & Barang dari Kertas	3,780.0	3,564.1	2,775.8

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2014 sektor pariwisata memberikan sejumlah devisa sebesar 11,166 juta US\$ berada pada posisi keempat dibawah CPO, batu bara, dan migas . Pada 2015 devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$ 12,225 juta atau berada di posisi keempat di bawah Migas US\$ 18,574 juta, CPO US\$ 16,427 miliar, dan batu bara US\$ 14,717 miliar. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata pada 2016 sebesar US\$ 10,135juta berada di posisi ketiga setelah CPO US\$ 12,136juta. Meskipun posisi sektor pariwisata pada tahun 2014 dan tahu 2015 sama-sama berada pada posisi keempat, akantetapi pendapatan devisa mengalami peningkatan sejak kebijakan bebas visa kunjungan diberlakukan. Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata sejak tahun 2016 sudah mengalahkan pemasukan dari batu bara dan di bawah pemasukan dari

migas dan CPO. Diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia(www.kemenpar.go.id).

Sejak program Bebas Visa Kunjungan (BVK) berlaku di tahun 2015, industri pariwisata telah mengalami pertumbuhan pesat, menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi, dan menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan. Pada tahun 2015, Menteri Pariwisata mengatur rencana strategis berupa target yang akan dicapai di tahun 2019. Rencana tersebut meliputi 20 juta wisatawan mancanegara serta pertukaran valuta asing sebanyak Rp240 triliun atau \$17,2 miliar, mempekerjakan 13 juta orang di industri pariwisata, serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga delapan persen. Berikut ini data Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia.

Tabel 1-2
Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

Sektor	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertanian	1.129.052,7	1.171.578,7	1.210.749,8
Pertambangan dan penggalian	794.489,5	767.327,2	774.593,1
Industry Pengolahan	185.425,7	1.934.533,2	2.016.876,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.882,5	7.369	7.634,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.177.297,5	1.207.751,1	1.255.759,4
Transportasi dan Pergudangan	326.933,0	348.773,8	374.843,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257.815,5	268.922,4	282.823,4
Informasi dan Komunikasi	384.475,6	421.741,4	459.208,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	319.825,5	347269	378.193,1
Real Estate	256.440,2	266.979,6	279.500,5
Jasa perusahaan	137.795,3	148.395,5	159.321,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	296.329,7	310.054,2	319.946,1

Wajib			
Jasa Pendidikan	263.685	283.020,1	293.779,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.357,1	97.463	102.487,8
Jasa Lainnya	134.070,1	144.902,4	156.523,4

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sektor pariwisata menyumbang pendapatan PDB sebesar 243.748,3 miliar rupiah meningkat 2,60 % untuk tahun 2014 sebesar 257.815,5. Untuk tahun 2015 pariwisata menyumbang sebesar 268.922,4 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2016, ketika kebijakan BVK diperluas menjadi 169 negara, pendapatan PDB dari sektor wisata meningkat menjadi 282.823,4 miliar rupiah dan pada tahun 2017 menyumbang sebesar 298.514,9 miliar rupiah.

Restrukturisasi di tahun 2015 selanjutnya menambahkan aktivitas perekonomian kreatif, sehingga Kementerian Pariwisata lebih banyak fokus pada pertumbuhan dan pemasaran destinasi wisata semata. Dengan kewenangan yang dipersempit tersebut, Kementerian Pariwisata juga mendapatkan peningkatan anggaran secara signifikan. Misalnya, anggaran pemasaran luar negeri di tahun 2016 ialah sebesar Rp1.777 triliun atau \$127 juta, yang jauh lebih besar dari keseluruhan anggaran Kementerian di tahun 2014. Dengan adanya peningkatan sumber daya fiskal yang padat dan tujuan program yang lebih terfokus, Kementerian Pariwisata mulai memusatkan upayanya untuk mengembangkan dan memasarkan empat destinasi wisata prioritas, yakni Labuan Bajo sebagai gerbang menuju Kepulauan Komodo, Candi Borobudur di Jawa Tengah sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO yang merupakan kuil Buddha peninggalan abad ke-9. Mandalika sebagai pariwisata yang tengah bertumbuh di Lombok Tengah, serta Danau Toba di Sumatera Utara yang merupakan danau kaldera vulkanik terbesar

di dunia. Tujuan pengembangan keempat area tersebut ialah meningkatkan profil Indonesia sebagai destinasi wisata utama selain Bali. Hingga kini, Bali telah berhasil menarik 5 juta dari total 14 juta wisatawan Indonesia tahun lalu, termasuk peningkatan besar dalam jumlah turis dari China.

Meski industri pariwisata Indonesia masih dapat berkembang dalam jangka panjang, bangsa ini perlu melakukan diversifikasi destinasi wisata untuk ditawarkan, sehingga tak lagi bergantung sepenuhnya pada daya tarik Bali dan mendistribusikan manfaat pariwisata secara lebih merata di seluruh penjuru negeri. Untuk itu, berbagai aspek pengembangan tengah diupayakan di keempat destinasi wisata utama. Langkah pertama yang dilakukan ialah reformasi kebijakan yang bertujuan untuk kerumitan birokrasi bagi para investor dan pengunjung.

Sejak tahun 2017, Indonesia didatangi oleh lebih dari 14 juta wisatawan mancanegara, jumlah yang meningkat lebih dari 2 juta turis dari tahun sebelumnya. Peningkatan drastis jumlah wisatawan dan masuknya mata uang asing tersebut tampaknya masih akan terus berlanjut. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah yang strategis dan terkoordinir dalam mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Faktor yang menggerakkan pertumbuhan pesat tersebut karena pemerintah seketika menetapkan tolak ukur jelas mengenai harapan disektor pariwisata, kemudian merancang dan menerapkan beragam upaya untuk mencapai target. Upaya tersebut diperkuat dengan melemahnya Rupiah, sehingga mendongkrak daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata bagi turis asing. Hal tersebut tentu saja hanyalah salah satu bagian dari gambaran besar yang meliputi upaya di berbagai aspek dalam menyusun kembali struktur Kementerian Pariwisata, memasarkan Indonesia secara agresif sebagai destinasi wisata,

memberlakukan reformasi kebijakan untuk menarik investasi asing, serta menargetkan destinasi wisata strategis di luar Bali dalam rangka promosi dan pembangunan. Berikut ini disajikan beberapa tabel yang menunjukkan peningkatan dari indikator pariwisata.

Tabel 1-3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Indonesia Tahun 20014-2016

Tahun	Jumlah Wisatawan Mancanegara
2014	9,435,411
2015	10,230,775
2016	11,519,275
2017	14,039,799

sumber: BPS dan diolah (ww.bps.go.id)

Berdasarkan data tersebut, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017 terus meningkat. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan meningkat sebesar 8,43%, tahun 2016 meningkat sebesar 12,59%, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar 21,88%.

Tabel 1-4
Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel bintang dan non Bintang tahun 2013-2015

Tahun	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) (Persen)	
	Hotel Bintang	Hotel non Bintang
2013	52.22	37.34
2014	52.56	35.87
2015	53.92	33.21

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Berdasarkan data di atas, tingkat hunian kamar untuk hotel bintang pada tahun 2013 sampai 2015 terus meningkat. Dimana pada tahun 2014 tingkat penghuni hotel bintang adalah 52,56% meningkat 0,34% dari tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 1,36%. Sedangkan tingkat hunian hotel dan non bintang dari tahun 2013 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan hingga 4,13%

Tabel 1-5
Data Jumlah Akomodasi Tahun 20014-2016

Tahun	Jumlah Akomodasi
2014	1996
2015	2197
2016	2387

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Berdasarkan data jumlah akomodasi di atas, dari tahun 2014 samapi 2016 semakin meningkat. Hal tersebut berhubungan dengan kunjungan wisatawan mancanegara. Semakin bertambah jumlah kunjungan wisatawan, semakin meningkat penggunaan dari akomodasi.

Tabel 1-6
Pertumbuhan Usaha Restoran dan Kafe di Indonesia Tahun 20014-2016

Tahun	Restoran dan Kafe (Usaha)
2014	4,291
2015	4,935
2016	5,675

Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Data pertumbuhan usaha restoran dan kafe di atas menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016. Pada tahun 2015 usaha restoran dan kafe meningkat 644 usaha dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 740 usaha. Usaha restoran dan kafe ini tumbuh seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan di Indonesia.

Disamping itu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan bebas visa terhadap 169 negara bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya adalah penurunan Penerimaan Negara Non-pajak (PNBP) yang selama ini berasal dari penerbitan visa Indonesia. Penerimaan Negara bukan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan Negara telah diatur dengan Undang-Undang No. 20/1997, tetapi bukan merupakan pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.20/1997 adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat tidak berasal dari penerimaan perpajakan, (Saidi, 2008). Penurunan PNBP dapat dilihat berdasarkan APBN.

Tabel 1-7
DataPNBP, 2014-2016 (miliar rupiah)

	2014	2015	2016
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	255.628,48	261.976,30
Penerimaan Sumber Daya Alam	240.848,30	100.971,87	64.901,90
Bagian laba BUMN	40.314,40	37.643,72	37.133,20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87.764,80	81.697,43	117.995,40
Pendapatan Badan Layanan Umum	29.681,00	35.315,46	41.945,90

Sumber: BPS dan dioalah (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2014 adalah sebesar 398.590,50 Milyar Rupiah, PNBP tahun 2015 sebesar 255.628,48 Milyar Rupiah dan pada tahun 2016 adalah sebesar 261.976,30. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan PNBP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Meskipun terdapat konsekuensi penurunan PNBP, namun pemerintah memiliki kebijakan untuk mengalihkan PNBP ke sektor lain, termasuk pariwisata. Misalnya, PNBP dari harga tiket kebun binatang atau PNBP lain di sektor wisata.

Dampak lain dari kebijakan bebas visa ini juga muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Sebagian orang asing memasuki wilayah Indonesia tanpa melapor kepada pemerintah contohnya TKA. Kemudahan ini muncul karena tidak semua kota ada pengawasan imigrasi. Dampak negatif yang dirasakan Indonesia yaitu, semakin banyaknya narkoba masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan segala cara. Berikut data pelanggaran narkoba di Indonesia.

Tabel 1-8
Data Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2014 sampai 2015

Tahun	Jumlah Kasus Narkoba		
	Narkotika	Psikotropika	Zat Adiktif Lainnya
2013	21.269	1.612	12.705
2014	23.134	836	10.885
2015	28.588	891	11.418

Sumber: Badan Narkotika Nasional (www.bnn.go.id).

Berdasarkan data di atas, jumlah pelanggaran narkotika dari tahun 2013 sampai 2015 terus meningkat. Untuk kasus psikotropika menurun pada tahun 2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015 walaupun tidak kembali pada angka 1.612 seperti yang terlihat pada tahun 2013. Demikian juga dengan kasus zat adiktif lainnya, menurun pada tahun 2014, dan kembali meningkat pada tahun 2015.

Selain kasus narkoba, banyak juga ditemukan kasus masuknya puluhan, ratusan atau ribuan buruh dari China. Itu merupakan dua contoh kasus yang salah satu penyebab utamanya karena adanya kebijakan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Selain itu, kebijakan bebas visa menyebabkan pelanggaran izin kunjungan. Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* secara keseluruhan sampai 24 Desember 2016 mencapai 26.449 untuk izin tinggal kunjungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi tentang kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia yang diberlakukan sejak tahun 2015. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis mengangkat judul “**Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata di Indonesia**”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kebijakan bebas visa berdampak kepada penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikarenakan biaya visa kunjungan ke Indonesia dari 169 Negara telah dihapus seiring diberlakukannya kebijakan itu.
2. Kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa melapor kepada pemerintah.
3. Sistem pengawasan terpadu mulai dari unsur imigrasi, dinas ketenagakerjaan, kepolisian, dan elemen masyarakat belum siap mengambangi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
4. Dengan diberlakukannya kebijakan bebas visa masuk terhadap 169 negara, kesulitan pengawasan semakin terasa.

1.3 BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan waktu dan kemampuan yang dimiliki, peneliti membatasi pada masalah perkembangan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata serta melihat perbedaan arus wisatawan mancanegara sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

1.3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata Indonesia pasca diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia?

2. Apakah terdapat perbedaan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata pasca diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia.
2. Melakukan analisa komparatif dengan teknik uji beda dalam melihat arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

1.5 Manfaat

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1.5.1 Manfaat Akademik

- a. Bagi peneliti:
 - (1) Sebagai bahan studi atau tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.
 - (2) Sebagai bahan studi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama.
 - (3) Sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.

b. Bagi mahasiswa:

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan sektor pariwisata setelah diberlakukannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

1.5.2 Manfaat Non-Akademik

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pendapatan Nasional

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional adalah penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern karena menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product* = GNP) yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh negara bersangkutan diukur menurut harga pasar yang berlaku disuatu negara.

Tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara dibidang perekonomian serta melihat pemerataan pembangunan bunga mencapai keadilan dan kemakmuran.
- (b) Untuk memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu tahun.

(c) Untuk mengkaji dan mengendalikan factor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu Negara.

(d) Untuk membantu merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berjangka guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam konsep pendapat nasional dikenal beberapa konsep berikut:

1. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* meliputi nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

2. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income = NNI*) adalah pendapatan yang menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah.

3. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan Perseorangan (*Personal Income = PI*) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan Perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (*Transfer Payment*).

Transfer Payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk memperoleh jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu seperti keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud akan dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

4. Pendapatan yang Siap Dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income* = DI) adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi, serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable Income* (DI) diperoleh dari *Personal Income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain, artinya, harus langsung ditanggung oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan.

2.1.1.1 Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Untuk menghitung pendapatan nasional dapat digunakan tiga pendekatan berikut:

(a) Pendekatan Pendapatan

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam menghitung pendapatan nasional pendekatan pengeluaran menggunakan rumus:

$$Y = w + r + i + p$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

w = *Wage* (upah atau gaji)

r = *Rent* (sewa)

i = *Interest* (bunga)

p = *Profit* (laba)

(b) Pendekatan Produksi

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

(c) Pendekatan Pengeluaran

Menghitung pendapatan negara melalui pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan melalui pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku

kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga (*Consumption*), pemerintah (*Government*), pengeluaran investasi (*Investment*), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi nilai impor ($X-M$). Dalam hal ini pendekatan pengeluaran menggunakan rumus berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2.1.2 Teori Penerimaan Negara

Sumber penerimaan negara merupakan pemungutan yang dilakukan negara sebagai penerimaan negara disamping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh musgrave (1989: 6). Penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan negara (pajak dan penerimaan bukan pajak). Kedua penerimaan negara tersebut secara umum berfungsi untuk mengalokasikan faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan

mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Mardiyasmo (2001: 2), mengungkapkan fungsi pemungutan bagi penerimaan negara ada dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Penerimaan negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Smith mengemukakan bahwa dalam melakukan pemungutan penerimaan negara perlu mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Prinsip Kesamaan/Keadilan (*Equity*)
- b. Prinsip Kepastian (*Certainty*), artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib bayar.
- c. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convenience*), artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tarif perundangan.
- d. Prinsip Ekonomi (*Economy*), artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia no.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak.

1. Penerimaan Negara (Pajak)

Penerimaan negara adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari:

a. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak).

b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

c. Pajak Penjualan Atas barang Mewah

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai jual setiap perpindahan/pertukaran barang, sehingga menimbulkan pajak berganda. PPnBM dikenakan terhadap:

1) Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dan dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut didalam daerah pabean kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2) Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

PPnBM akhirnya dibebankan kepada konsumen, pengusaha kena pajak hanya memungut dan menyetor PPnBM kepada kas negara.

d. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan-perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah atau bangunan oleh perseorangan atau badan.

e. Cukai

Cukai merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang. Sebagai konsekuensi manufaktur cenderung membebani pajak kedalam harga yang mereka kenakan pada produk. Maka secara tidak langsung konsumen terbebani pajak.

f. Pajak Lainnya

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penarikan pajak dalam negeri dari sektor non-migas.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara di luar penerimaan perpajakan. PNBP telah mengalami beberapa kali perubahan klasifikasi sejalan dengan jumlah dan kontribusinya dalam pendapatan negara. PNBP terdiri dari:

(a) Penerimaan Sumber Daya Alam

- Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas). Penerimaan SDA migas merupakan bagian pemerintah atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Production Sharing (KPS), setelah dikurangi faktor pengurang berupa pajak-pajak dan pungutan lainnya.
- Penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA non-migas). Penerimaan SDA non-migas merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam di luar minyak dan gas bumi. Sumber penerimaan SDA non-migas meliputi: Pendapatan pertambangan umum, Pendapatan kehutanan, Pendapatan perikanan, dan Pendapatan pertambangan panas bumi.

(b) Pendapatan Bagian Laba BUMN

Pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non-perbankan.

(c) Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan pendidikan.

(d) Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan atau Penerimaan BLU adalah penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh badan layanan umum. Jenis pendapatan BLU antara lain: pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah badan layanan umum, pendapatan hasil kerjasama BLU dan pendapatan BLU lainnya (Machmud, 2014).

2.1.3 Teori pariwisata

A. Pengertian Pariwisata

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut (Dirjen Pariwisata, 2009:7). Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula (Muljadi, 2009). Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya.

Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan

termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata:

- a. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU no.10 tahun 2009, tentang pariwisata).
- b. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996).

B. Dampak Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang

mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya (Yoeti, 1985).

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.

Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: *pertama*, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; *kedua*, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga *point* diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut(Muljadi, 2009) :

a. Dampak Ekonomi

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja.

Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Dampak Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja.

Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Dampak Kebudayaan

1) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

- 3) Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

1. Ciri-ciri pariwisata

Ciri-ciri pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang melakukan perjalanan dan keluar meninggalkan tempat tinggalnya.
- b. Perjalanan itu dilakukan keluar jauh dari lingkungan tempat tinggalnya yang semula.
- c. Perjalanan itu dilakukan sendirian atau bersama-sama dengan orang lain (rombongan atau grup).
- d. Perjalanan itu dilakukan hanya untuk sementara waktu dan bisa melebihi waktu 24 jam atau sehari-semalam penuh.
- e. Perjalanan itu terkait dengan kegiatan atau rekreasi, atau usaha menyenangkan dirinya.
- f. Orang-orang yang melakukan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.
- g. Selama dalam perjalanan tinggal di suatu tempat/akomodasi.
- h. Dalam melakukan perjalanan, melalui alat transportasi laut, darat atau udara.

2. Sistem Pariwisata

Elemen-elemen dari sebuah sistem pariwisata yang sederhana menyangkut sebuah daerah/negara asal wisatawan, sebuah daerah / negara tujuan wisata, dan sebuah tempat transit serta sebuah generator yang

membalik proses tersebut. Ada lima elemen pokok yaitu: *traveler-generating region, departing traveler, transit route region, tourist destination region, dan returning traveler*. Namun demikian menyangkut tiga elemen pokok yaitu elemen wisatawan, tiga elemen geografis (gabungan dari *traveler generator, transit route, dan tourist destination*) dan elemen industri pariwisata.

Menurut Mathieson dan Wall terdapat tiga elemen dalam pariwisata yaitu:

- a. *A Dynamic Element*, yaitu perjalanan ke suatu destinasi wisata.
- b. *A Statistic Element*, yaitu singgah di daerah tujuan.
- c. *A Consequential Element*, merupakan akibat dari dua hal di atas yaitu *travel* ke suatu destinasi wisata dan singgah di daerah wisata (khususnya masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

3. Usaha Wisata

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- a. Daya tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata
- d. Jasa perjalanan wisata
- e. Jasa makanan dan minuman
- f. Penyediaan akomodasi

- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- i. Jasa informasi pariwisata
- j. Jasa konsultan pariwisata
- k. Jasa pramuwisata
- l. Wisata tirta
- m. Spa

4. Industri Pariwisata

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

5. Destinasi Wisata

Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta, masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

6. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi daerah tujuan wisata (DTW) sangat tergantung kepada tiga faktor utama yaitu antara lain (Muljadi, 2009):

a. Atraksi, dapat dibedakan menjadi :

pertama, Tempat : umpunya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah.

Kedua, Kejadian/Peristiwa : kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olah raga, festival dan sebagainya.\

b. Mudah dicapai (Aksesibilitas) :

Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ketempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.

c. Amenitas :

Tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ketempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.

7. Pengembangan Pariwisata

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangan suatu obyek wisata. Menurut Ahdinoto, ada lima jenis komponen dalam pariwisata yaitu:

a. Atraksi wisata : atraksi adalah daya tarik wisatawan untuk berlibur.

Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumberdaya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, maka bagian utama lain tidak akan diperlukan.

b. Promosi dan pemasaran : Promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana

agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah bagian penting.

- c. Pasar wisata : (masyarakat pengirim wisata) : pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum / tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.
- d. Transportasi : pendapat dan keinginan wisatawan berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- e. Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

komponen penting dalam pengembangan pariwisata menurut George (Mcintyre, 1993) mengungkapkan bahwa suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek wisata yang baik.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata menurut Suwanto meliputi (Yoeti, Oka A, 1997):

- a. Obyek dan daya tarik wisata

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- 1) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya
- 3) Adanya spesifikasi atau ciri khusus yang bersifat langka
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
- 5) Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain).
- 6) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

c. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di

daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

2.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Pada pertengahan tahun 2015 pemerintah melakukan suatu kebijakan besar yang dinilai dapat memberi dampak yang besar terhadap kiprah pariwisata Indonesia di mata dunia. Presiden RI Joko Widodo pada bulan Juni 2015 mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Setidaknya ada tiga (3) tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan denganditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21 /2016 (169 negara).

Berdasarkan Perpres No. 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang BVK, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik

Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (pasal 6 angka (4) Perpres No. 104/2015). Izin diberikan bagi orang asing dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. (pasal 6 angka 2). Dengan diresmikannya Perpres ini, berarti Indonesia telah memberlakukan bebas visa bagi 45 negara. Pada tahun 2016, kebijakan ini diperluas hingga ke 169 negara. Adapun jumlah negara yang diberikan bebas visa berdasarkan Benua yaitu, Benua Eropa sebanyak 52 negara, Benua Asia 42 negara. Benua Amerika 23 negara, Benua Australia 18 negara, dan Benua Afrika 34 negara. Tujuan dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut yaitu untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ditargetkan sebesar 20 juta wisatawan pada tahun 2019.

Tabel 2-1
Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan

No	Nama Negara	No	Nama Negara	No	Nama Negara
1	Afrika Selatan	58	Italia	115	Polandia
2	Albania	59	Jamaika	116	Portugal
3	Aljazair	60	Jepang	117	Puerto Rico
4	Amerika Serikat	61	Jerman	118	Qatar
5	Andorra	62	Kamboja	119	Republik Dominika
6	Angola	63	Kanada	120	Romania
7	Antigua dan Barbuda	64	Kazakhstan	121	Rusia
8	Arab Saudi	65	Kenya	122	Rwanda
9	Argentina	66	Kepulauan Marshall	123	Saint Kitts dan Navis

10	Armenia	67	Kepulauan Solomon	124	Saint Lucia
11	Australia	68	Kiribati	125	Saint Vincent dan Grenadis
12	Austria	69	Komoro	126	Samoa
13	Azerbaijan	70	Korea Selatan	127	San Marino
14	Bahama	71	Kosta Rika	128	Sao Tome dan Principe
15	Bahrain	72	Kroasia	129	Selandia Baru
16	Bangladesh	73	Kuba	130	Senegal
17	Barbados	74	Kuwait	131	Serbia
18	Belanda	75	Kyrgystan	132	Seychelles
19	Belarusia	76	Laos	133	Singapura
20	Belgia	77	Latvia	134	Siprus
21	Belize	78	Lebanon	135	Slovakia
22	Benin	79	Lesotho	136	Slovenia
23	Bhutan	80	Lichtenstein	137	Spanyol
24	Bolivia	81	Lithuania	138	Sri Lanka
25	Bosnia dan Herzegovina	82	Luksemburg	139	Suriname
26	Botswana	83	Macao (SAR)	140	Swaziland
27	Brazil	84	Madagaskar	141	Swedia
28	Brunei Darussalam	85	Makedonia	142	Swiss
29	Bulgaria	86	Maladewa	143	Taiwan
30	Burkina Faso	87	Malawi	144	Tajikistas
31	Burundi	88	Malaysia	145	Tahta Suci Vatikan
32	Cheko	89	Mali	146	Tanjung Verde
33	Chad	90	Malta	147	Tanzania
34	Chili	91	Maroko	148	Thailand
35	Denmark	92	Mauritania	149	Timor Leste
36	Dominika	93	Mauritius	150	Togo
37	Ekuador	94	Meksiko	151	Tonga
38	El Salvador	95	Mesir	152	Trinidad dan Tobago
39	Estonia	96	Moldova	153	Tunisia
40	Fiji	97	Monako	154	Turki
41	Filipina	98	Mongolia	155	Turkmenistan
42	Finlandia	99	Mozambik	156	Tuvalu
43	Gabon	100	Myanmar	157	Uganda
44	Gambia	101	Namibia	158	Ukraina
45	Georgia	102	Nauru	159	Uni Emirat Arab
46	Ghana	103	Nepal	160	Uruguay
47	Grenada	104	Nikaragua	161	Tiongkok
48	Guatemala	105	Norwegia	162	Uzbekistan
49	Guyana	106	Oman	163	Vanuatu
50	Haiti	107	Palau	164	Venezuela

51	Honduras	108	Palestina	165	Vietnam
52	Hongaria	109	Panama	166	Yordania
53	Hongkong (SAR)	110	Pantai Gading	167	Yunani
54	India	111	Papua Nugini	168	Zambia
55	Inggris	112	Paraguay	169	Zimbabwe
56	Irlandia	113	Perancis		
57	Islandia	114	Peru		

Sumber: Dirjen Imigrasi (www.imigrasi.go.id)

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2-2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tri Adi Bagas prahasto , Kebijakan Bebas Visa Oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2015	Deskriptif kualitatif	- Jumlah Kunjungan Wisman - Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat - Perolehan devisa Indonesia menurut lapangan kerja - Proyeksi pemasukan dalam perolehan devisa Indonesia	Pemberlakuan kembali kebijakan bebas visa Kunjungan Singkat pada masa pemerintahan Jokowi merupakan langkah mengetahui bagaimana perjalanan dan pemberlakuan kebijakan bebas visa terkait Asia Tenggara serta sebagai strategi untuk menarik kembali wisatawan mancanegara maka Pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa sebagai wujud keamanan dan ketertiban telah pulih kembali.
2	Ni Wayan Sri Ertami Damayanti Ngakan Ketut Dunia , Pengaturan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Meningkatkan	Metode penelitian hukum normatif	- Jumlah wisman di Indonesia - Daftar negara bebas visa kunjungan indonesia	- Pengaturan Kebijakan bebas visa kunjungan dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia diatur melalui Perpres Nomor 21 Tahun

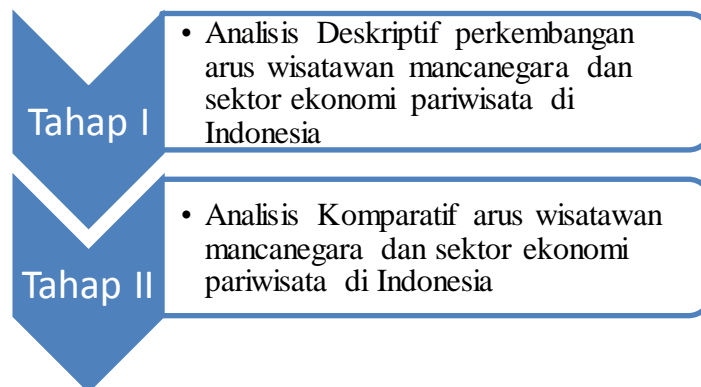
	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia			<p>2016, dan juga diatur dalam Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2016.</p> <p>-Sanksi bagi penerima bebas visa kunjungan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dapat dilihat dalam Pasal 78 dan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.</p>
3	Athira Maulida , Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<p>-jumlah tenaga kerja asing di Indonesia</p> <p>-visa kunjungan</p> <p>-penanaman modal asing di Indonesia</p>	<p>- Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka “pintu” lebar-lebar investasi asing di Indonesia yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia</p> <p>-menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi, seperti misalnya pro dan kontra terhadap keberadaan tenaga kerja asing karena adanya gesekan antara tenaga kerja lokal Indonesia dengan tenaga kerja</p>

				asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal
--	--	--	--	--

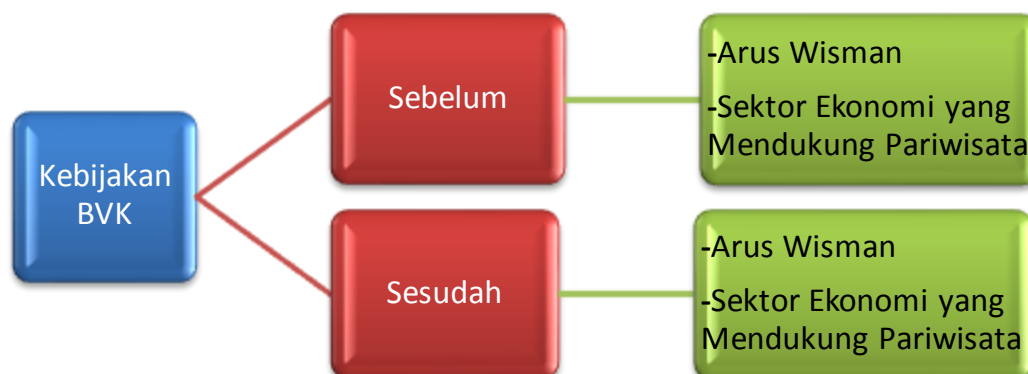
2.4 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting dan telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual menghubungkan secara teoritis dari variabel penelitian. Yang menjadi kerangka konseptual ini adalah kebijakan Bebas Visa Kunjungan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor pariwisata. Berikut ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2-1
Bagan Konseptual



Gambar 2-2
Kerangka Penelitian



2.5 Hipotesa

Dengan tingkat kesalahan 5% akan diuji kebenaran hipotesa berikut:

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang bertujuan mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Kemudian melakukan analisis komparatif dengan teknik uji beda yang bertujuan untuk melihat perbedaan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi yang mendukung pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Data yang disajikan adalah data time series dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Adapun variabel yang akan diamati adalah Jumlah Wisatawan Mancanegara, Akomodasi, Pertumbuhan Restoran, Pendapatan Devisa Pariwisata, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Tindakan Administrasi Keimigrasian.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

Tabel 3-1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Devisa	Jumlah devisa pariwisata Indonesia dalam juta US\$.	BPS (Badan Pusat Statistik)- www.bps.go.id
PNBP	Seluruh penerimaan negara yang tidak berasal dari penerimaan pajak dalam Miliar Rupiah	Kementerian Keuangan- www.kemenkeu.go.id
Kunjungan Wisatawan Asing	Jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan pintu masuk dalam satuan jiwa	Kementerian Pariwisata- www.kemenpar.go.id
Akomodasi	Jumlah Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya dalam satuan unit	BPS (Badan Pusat Statistik)- www.bps.go.id
Pertumbuhan Restoran	Laju pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam persentase	BPS (Badan Pusat Statistik)- www.bps.go.id
Rata-Rata Lama Menginap	Lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non bintang dalam satuan malam	BPS (Badan Pusat Statistik)- www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat kebijakan Bebas Visa kunjungan melalui data Pendapatan Nasional di Indonesia mulai dari tahun 2013 sampai hingga 2017 yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, dan Dirjen Keimigrasian.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 4 bulan yaitu November 2018 sampai Maret 2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu data sekunder, karena data telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan bentuk adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik. Berdasarkan waktu, karena untuk melihat uji beda maka digunakan data panel.

3.4.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Dirjen Imigrasi, dan dalam bentuk buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dengan objek penelitian mencakup seluruh Indonesia dan dengan kurun waktu dari tahun 2013 sampai 2017.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis suatu kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata di Indonesia dengan menggunakan

analisis deskriptif kuantitatif yang digambarkan dalam bentuk tabel dan diagram untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Serta analisis komparatif yang menunjukkan perbedaan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan.

3.7 Tahapan Analisis

3.7.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan arus wisatawan mancanegara dan sektor ekonomi pariwisata pasca kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia.

3.7.2 Analisis Komparatif (Uji Beda)

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Misalkan dalam jumlah sampel yang diamati adalah n , sebelum diadakan perlakuan, eksperimen datanya adalah $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, dan sesudah dilakukan eksperimen, sampel tersebut diukur lagi dan datanya

adalah $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, jadi pasangan berurutan data sampelnya (X, Y) ;
 $\{(x_1, y_1); (x_2, y_2); \dots (x_n, y_n)\}$ perbedaan setiap pasangan adalah $(X - Y)$;
 $\{(x_1 - y_1); (x_2 - y_2); \dots (x_n - y_n)\}$ yang menjadi simbol $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, dan
 \bar{b} adalah parameter yang diamati, pengujiannya dapat dilakukan sebagai
 berikut:

Hipotesis:

$H_0: \bar{b} = 0$ (tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan)

$H_a: \bar{b} \neq 0$ (ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan)

Yang diperlukan adalah nilai-nilai: n, \bar{b}, S_b , uji statistik yang digunakan yaitu:

$$t = \frac{\bar{b}}{S_b / \sqrt{n}}$$

Dimana: b = beda tiap pasangan sampel

$$\bar{b} = \frac{\sum b_i}{n}, i = (1, 2, \dots, n)$$

$$S_b = \sqrt{\frac{\sum (b_i - \bar{b})^2}{n-1}} \text{ atau } S_b = \sqrt{\frac{n \sum b^2 - (\sum b)^2}{n(n-1)}}$$

Seperti pembahasan yang terdahulu, jika jumlah sampel lebih dari 30
 yaitu $n > 30$, maka uji variabel yang digunakan adalah distribusi normal Z,
 yaitu:

$$\text{Uji Z} = \frac{\bar{b}}{\frac{\sigma_b}{\sqrt{n}}}$$

Dimana kesalahan baku populasi dapat diwakili kesalahan baku sampel S_b ,
 sehingga uji Z,

$$Z = \frac{\bar{b}}{S_b / \sqrt{n}}, \text{ dan dibandingkan dengan } Z_{\text{tabel}},$$

Kriteria uji terima H_0 , jika $-Z_{tabel} \leq Z \leq Z_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Jika dalam kasus sampel kecil yaitu $n \leq 30$ digunakan uji parameter t dan dibandingkan dengan $t_{tabel} = t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}$. Selanjutnya kriteria uji terima H_0

jika $-t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)} < t < t_{(\frac{\alpha}{2}, n-1)}$, hal lain tolak H_0 atau terima H_a .

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan mancanegara. Sejak tahun 2006, Indonesia telah menerapkan Ekonomi kreatif yang dinilai dapat memberikan peran dalam memperbaiki citra pariwisata Indonesia. Proses pengembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan *Indonesian Design Power* oleh Departemen Perdagangan untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2007 dilakukan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia 2007 pada *Trade Expo* Indonesia. Pada tahun 2008, dilakukan peluncuran cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025 dan cetak biru pengembangan 14 subsektor industri kreatif Indonesia. Adapun 14 subsektor tersebut adalah periklanan, arsitektur, pasar barang dan seni, kerajinan, desain, fashion, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan. Selain itu, dilakukan pencanangan tahun Indonesia Kreatif 2009. Untuk mewujudkan Indonesia kreatif, tahun 2009 diadakan Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif yang berlangsung setiap tahunnya.

Pada bulan Juni 2015 Presiden RI Joko Widodomelakukan suatu kebijakan yang dinilai dapat memberi dampak terhadap pariwisata Indonesia di mata dunia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Ada tiga tahap pemberlakuan pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Tahap pertama, Perpres No. 69/2015 tentang BVK yang ditandatangani Presiden pada 9 Juni 2015 (30 negara). Tiga bulan kemudian, kebijakan BVK tahap II mulai diberlakukan denganditandatanganinya Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 69/2015 (75 negara) pada 18 September 2015, dan Tahap III melalui Perpres No. 21 /2016 (169 negara). Sehingga pada tahun 2016, kebijakan ini diperluas hingga ke 169 negara. Keuntungan yang didapat Indonesia dari kebijakan bebas visa tersebut adalah devisa dan kunjungan wisatawan asing. Dengan penambahan bebas visa sekarang, Indonesia bisa mendapat devisa sebesar 1 miliar dollar. Dengan pembebasan visa tersebut, wisatawan mancanegara dapat mengunjungi Indonesia dengan mudah.

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Pariwisata di Indonesia

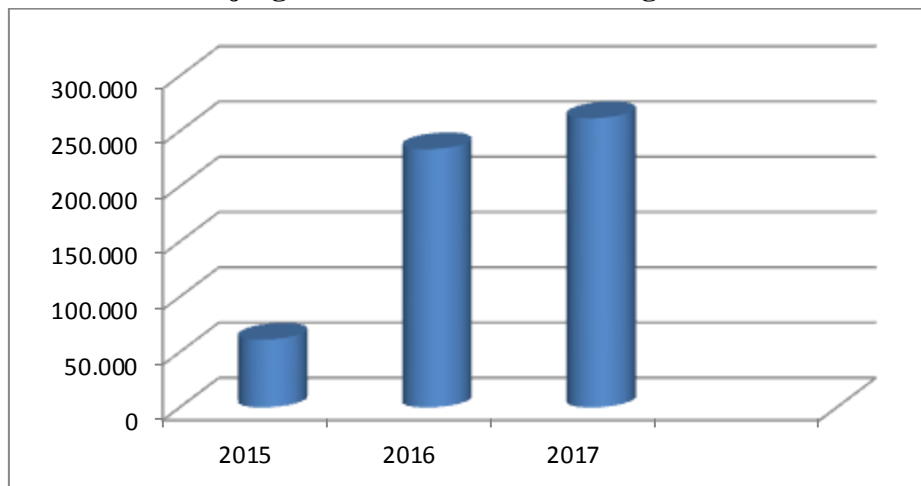
Sadar akan potensi wisata alam yang dimiliki Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga mencapai 20 juta orang pada tahun 2019. Sejak tahun 2016, pemerintah sudah melakukan berbagai strategi khusus untuk mendatangkan 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan domestik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan 10 destinasi unggulan. Kesepuluh destinasi ini dipilih oleh Kementerian Pariwisata Indonesia berdasarkan jumlah kunjungan per provinsi dan potensi yang luar biasa yang diharapkan mampu menarik perhatian wisatawan. Adapun 10 destinasi pariwisata prioritas yang ditetapkan oleh dinas pariwisata provinsi adalah sebagai berikut.

1. Danau Toba

Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara. Danau ini memiliki luas 30 x 300 kilometer dan kedalamannya mencapai lebih dari 500 meter. Yang unik dari destinasi ini adalah adanya pulau kecil bernama Samosir yang berada di tengah danau. Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Danau Toba terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dalam dalam grafik dibawah ini.

Gambar 4-1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Danau Toba



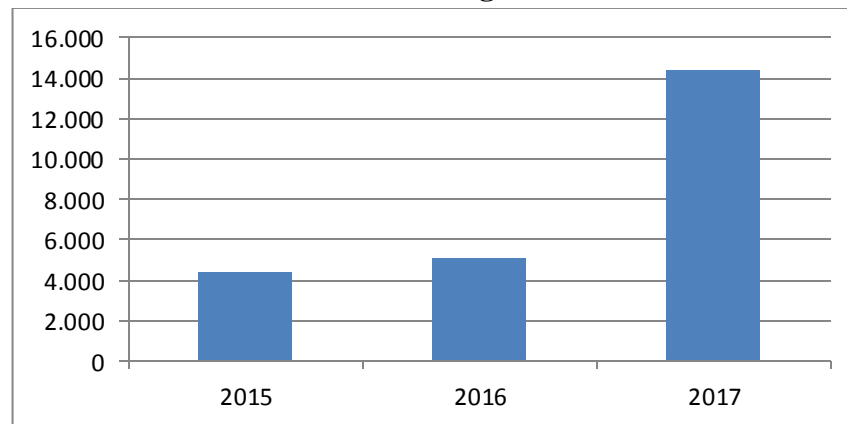
Pada grafik di atas, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Danau Toba pada tahun 2015 sebanyak 61.337 orang, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 233.643 wisman, kemudian pada tahun 2017 juga meningkat yaitu 261.736 wisman. Jumlah wisman yang berkunjung ke Danau Toba meningkat seiring dengan pencapaian dari destinasi pariwisatanya seperti dibukanya penerbangan internasional Singapore-Silangit pada 28 Oktober 2017, peresmian jalan tol Medan-Tebing Tinggi dan beroperasi mulai 13 Oktober 2017, pemancangan

dermaga danau toba dan penyelesaian status lahan otorita Sibisa di Kabupaten Toba Samosir.

2. Pantai Tanjung Kelayang

Pantai Tanjung Kelayang memiliki ciri khas batuan yang terserak, yaitu batuan besar yang tersusun dan membentuk sejumlah “pulau batu”. Di luar itu, pantai yang berjarak sekitar 27 km dari Pulau Belitung ini terdapat hamparan air jernih kebiruan yang sangat cocok untuk berenang. Pantai Tanjung Kelayang semakin diminati oleh wisatawan asing, dapat dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Bangka Belitung.

Gambar 4-2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bangka Belitung



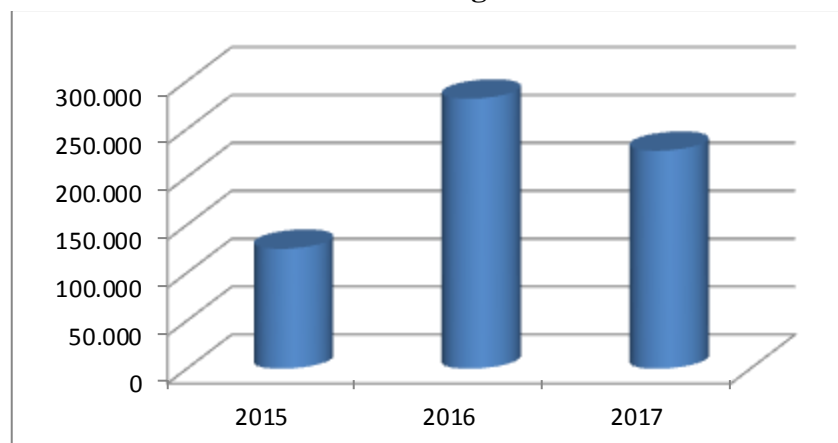
Data di atas menunjukkan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bangka Belitung tahun 2015 berjumlah 4.387 orang, sedangkan tahun 2016 menjadi 5.106 orang. Kemudian pada tahun 2017, jumlah wisatawan meningkat signifikan menjadi 14.366 wisman. Wisman yang masuk ke Belitung berasal dari 73 negara, namun masih didominasi oleh negara-negara di Kawasan Asia. Berdasarkan data yang dihimpun Pos Belitung, China

menempati posisi pertama dari 10 negara asal wisatawan tertinggi yang mengunjungi Belitung dengan jumlah 848 orang.

3. Pantai Tanjung Lesung

Pantai Tanjung Lesung berada di kawasan Banten. Dengan garis pantai berpasir putih sepanjang 15 km, pengunjung bisa menikmati pemandangan tropis dengan santai. Selain itu, wisatawan juga bisa melakukan kegiatan air seperti mendayung, naik *banana boat*, juga *jet ski*. Yang paling khas di Pantai Tanjung Lesung adalah perkampungan nelayan yang asri dan berada di dekat pantai. Dan kegiatan budaya di Wisata Kampung Cikadu yang menggelar pertunjukan seni secara rutin, mulai dari tarian hingga permainan musik tradisional. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pantai Tanjung Lesung ini meningkat sangat signifikan di tahun 2016 yaitu sebanyak 281.758 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 125.162 wisman. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan terhadap kunjungan wisman yaitu menjadi 227.441 wisman. Data dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Gambar 4-3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pantai Tanjung Lesung

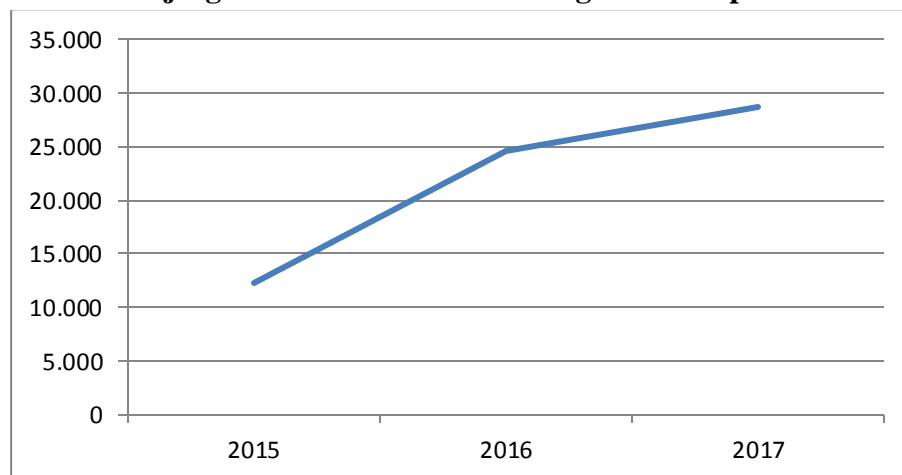


4. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah pulau sekitar 105 buah, jika dilihat dari atas pulau-pulau ini akan membentuk sebuah gugusan berwarna hijau dengan perairan jernih kebiruan. Sebagian pulau tak memiliki penghuni dan menjadi bagian dari kawasan konservasi. Jadi ada banyak sekali pulau yang memiliki potensi alam yang sangat terjaga. Salah satu ikon yang paling menarik perhatian adalah Jembatan Cinta di Pulau Tidung, gugusan pulau bagian selatan. Jembatan Cinta memiliki panjang 800 meter dan berfungsi untuk menghubungkan Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Dibawah ini data kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Seribu.

Gambar 4-4

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Seribu



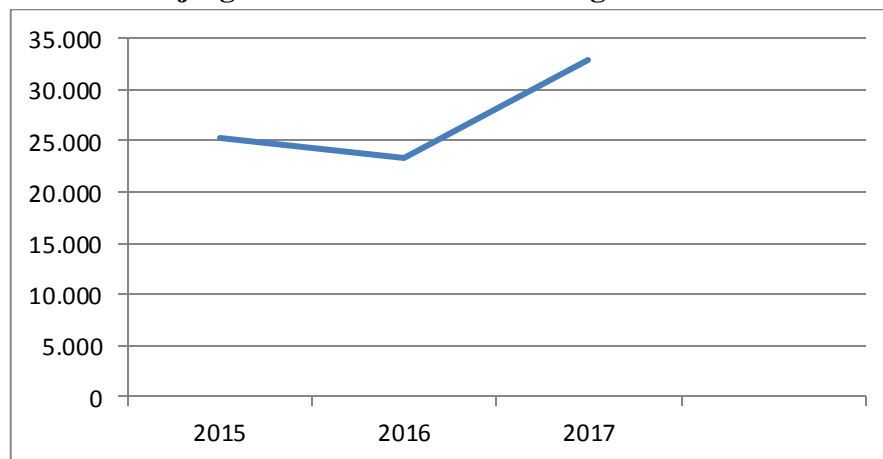
Berdasarkan data di atas, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Adapun tahun 2015 berjumlah 12.254 wisman, kemudian pada tahun 2016 meningkat lebih dari 50% atau sebanyak 24.517 wisatawan, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 28.731 wisman. Salah satu penyebab meningkatnya wisatawan mancanegara ke Kepulauan Seribu karena adanya penambahan jumlah

pelayaran / *trip per day* dan kapal berukuran besar (300-400 orang), dan juga telah dibangun dermaga di Ancol Barat untuk penambahan akses transportasi ke Kepulauan Seribu.

5. Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada sekitar tahun 750 dengan gaya arsitektur India. Selain stupa induk di puncaknya, candi ini memiliki 2.672 panel relief, 504 arca Buddha, dan 72 stupa berlubang. Selain bangunan yang megah, lokasi candi yang berada di antara dua pasang gunung, yaitu Gunung Sundoro – Sumbing dan Gunung Merbabu – Merapi, sehingga membuatnya memiliki pemandangan alam yang luar biasa indah.

Gambar 4-5
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Candi Borobudur



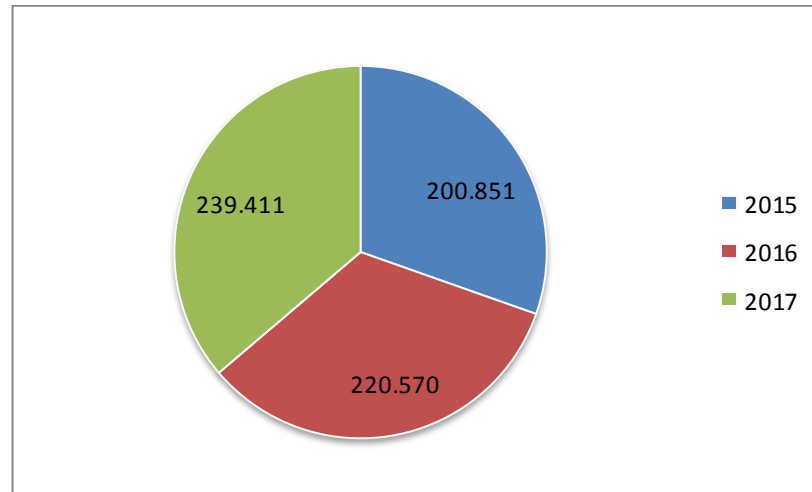
Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2017 berjumlah 32.876, angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 23.303 wisman. Salah penyebab meningkatnya kunjungan wisman ke Borobudur karena tercapainya pembangunan infrastruktur pariwisata di sekitar Borobudur (Joglosemar),

seperti pembangunan rel kereta Bandara Adi Sumarmo ke Stasiun Solo Balapan, dan penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan tol Bawen-Jogja.

6. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki lautan pasir seluas 5.250 km di atas ketinggian 2.100 mdpl. Di kawasan Gunung Bromo sendiri, yang paling disukai oleh wisatawan adalah fenomena terbit dan tenggelamnya matahari karena keindahannya sulit ditemukan di tempat lain.

Gambar 4-6
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru



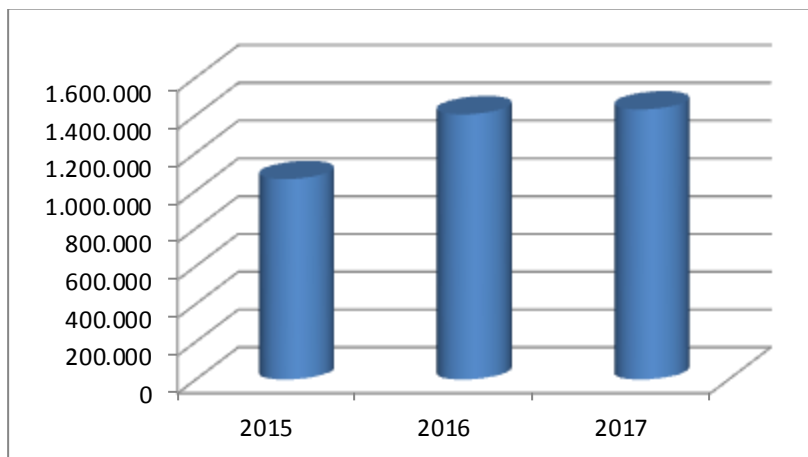
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tahun 2015 sebanyak 200.851 wisatawan. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 220.570 wisatawan atau meningkat 9,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah wisatawan terus terjadi hingga taun 2017. Pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara menjadi 239.441 wisatawan atau meningkat 8,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun keberhasilan dari pengembangan pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah telah tersusunnya rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otoritas Pengelola Kawasan Bromo Tengger Semeru.

7. Mandalika

Lombok sudah dikenal sebagai pulau yang kaya akan pantai-pantai cantik, salah satunya adalah kawasan Mandalika. Di sini terdapat lima pantai yang sangat diminati wisatawan yaitu Pantai Tanjung Aan, Pantai Kuta, Pantai Serenting, Pantai Gerupuk, dan Pantai Keliuw.

Gambar 4-7
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Mandalika (Jiwa)

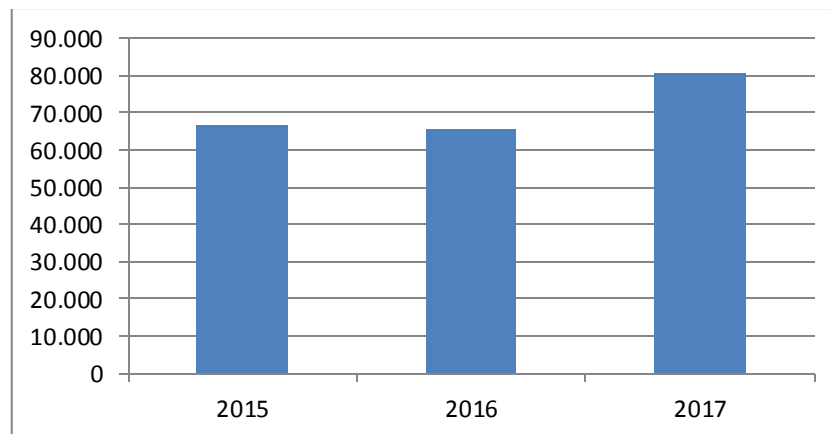


Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Mandalika pada tahun 2015 sebesar 1.061.292 wisatawan. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara meningkat menjadi 1.404.328 wisatawan atau tumbuh sebesar 32,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. sedangkan pada tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara kembali menunjukkan peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 1.430.249 wisatawan atau meningkat 1,8 persen dibandingkan tahun 2016.

8. Labuan Bajo

Labuan Bajo disebut sebagai salah satu kota pelabuhan tercantik di Indonesia. Yang paling diunggulkan adalah pemandangan terbenamnya matahari dengan siluet kapal yang mengapung di atas perairan. Yang paling khas di Labuan Bajo adalah Kampung Melo yang berjarak sekitar 17 km dari Bandara Komodo Labuan Bajo adalah desa adat yang masih terjaga di tengah arus modernisasi. Di sini, masyarakat seringkali mengadakan pertunjukan budaya yang menarik perhatian wisatawan, salah satunya adalah Tari Caci. Karena keindahannya, banyak wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Berikut ini data jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 sampai 2017.

Gambar 4-8
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Labuan Bajo



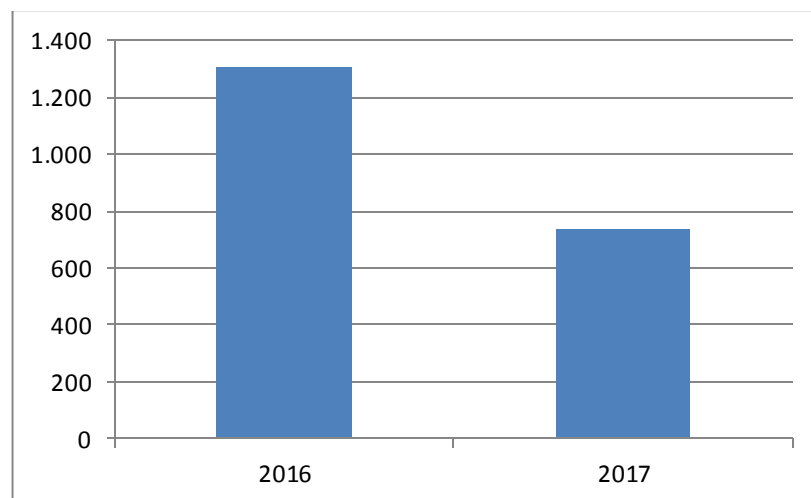
Pada tahun 2015, jumlah wisman yang berkunjung ke NTT adalah sebanyak 66.860 wisman. Pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 65.499 wisman. Namun pada tahun 2017, jumlah wisman yang berkunjung ke NTT kembali meningkat melebihi tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 80.665 wisatawan. Untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara ke Labuan Bajo, pada tahun 2017 telah disusun rancangan peraturan presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Labuan Bajo.

9. Pulau Morotai

Pulau Morotai berada di Provinsi Maluku Utara dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Dijuluki sebagai “Mutiara di Bibir Pasifik”, pulau ini menjadi saksi penting sejarah Perang Dunia II sebagai lokasi pertempuran sengit Jepang melawan Amerika Serikat. Itu sebabnya, ada banyak peninggalan sejarah yang masih dijaga oleh masyarakat lokal hingga sekarang, seperti kendaraan meriam, landasan pesawat tempur, hingga kendaraan lapis baja yang tersebar di beberapa titik. Pulau Morotai menjadi destinasi prioritas Pariwisata sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, Pulau Morotai didatangi wisatawan asing sebanyak 1.304. Namun jumlah tersebut menurun pada tahun 2017 menjadi 734 orang seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini.

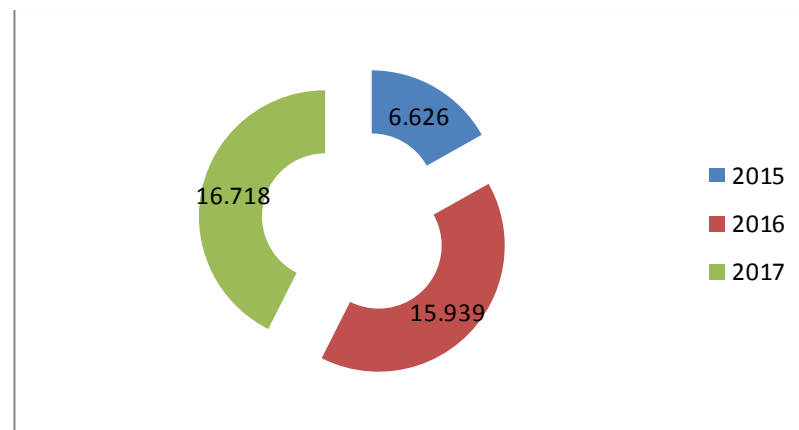
Gambar 4-9
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Pulau Morotai



10. Taman Nasional Wakatobi

Taman Nasional Wakatobi merupakan gugusan pulau yang memiliki potensi alam bawah laut luar biasa. Menurut para ahli, perairan di sini memiliki sekitar 112 gugusan terumbu karang dan lebih dari 93 spesies ikan dengan beragam bentuk juga warna. Keindahan destinasiya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Wakatobi terus meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat dalam diagram berikut ini.

Gambar 4-10
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Taman Nasional Wakatobi



Pada tahun 2015, jumlah wisman yang berkunjung ke Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 6.626 jiwa, pada tahun 2016 meningkat signifikan yaitu 15.939 wisman. Kemudian pada tahun 2017 juga meningkat menjadi 16.718 wisatawan mancanegara. Dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah telah membentuk badan otorita pengelola kawasan pariwisata Wakatobi, percepatan bandara Internasional Komodo, pengembangan bandara Matahora Wakatobi, dan peningkatan konektivitas udara ke Wakatobi.

Berdasarkan keseluruhan data di atas, dapat terlihat destinasi yang mengalami peningkatan kunjungan wisman yang cukup signifikan yaitu Borobudur dan Labuan Bajo. Salah satu faktor penting terkait peningkatan wisman di 10 destinasi prioritas antara lain disebabkan oleh peningkatan infrastruktur dan konektivitas aksesibilitas. Sebagai contoh, adanya pembukaan rute penerbangan langsung oleh maskapai Garuda dari Jakarta ke Labuan Bajo di akhir tahun 2016. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yaitu mencakup kegiatan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis terkait dengan pengembangan aksesibilitas (darat, udara, dan laut), pengembangan atraksi (wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan), serta pengembangan amenities.

4.1.2 Perkembangan Arus Wisatawan Mancanegara Pasca Diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Berikut adalah target dan realisasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Tabel 4-1
Realisasi Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2015 sampai tahun 2017 (Juta Jiwa)

2015			2016			2017		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
10	10,41	100,26	12	12,02	100,2	15	14,04*	93,60

Sumber: Kemenpar 2017

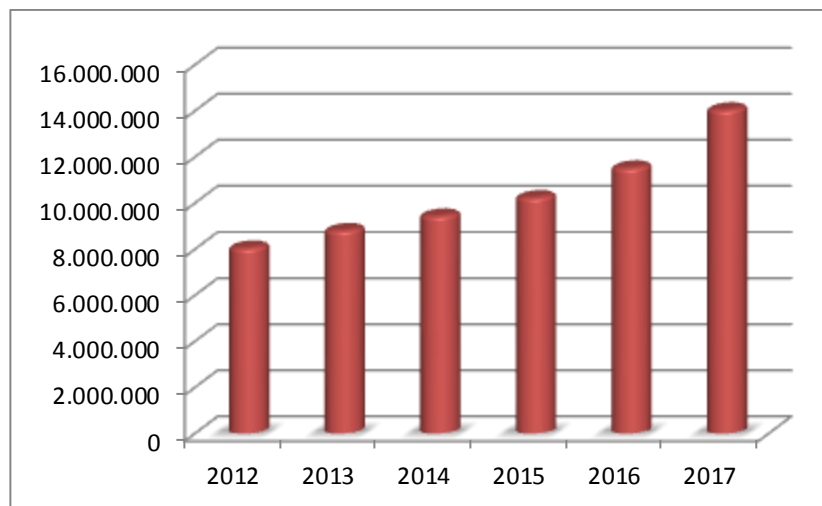
* Data Sementara (Pragnosa)

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran “jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia” mencapai 10.406.759 jiwa, capaian tahun 2015 tersebut melampaui target yang telah ditentukan sebesar 10.000.000 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 0,26%. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 12.023.971 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 0,2% dari target yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 12.000.000 wisatawan mancanegara. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 15,54%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari terobosan-terobosan yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Salah satu terobosan baru yang sangat berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini adalah adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberikan kepada 169 negara. Terobosan lain yang dilakukan oleh kementerian pariwisata adalah melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan di *cross border* dan ekstrapolasi untuk penggunaan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk mengitung wisatawan mancanegara yang masuk melalui Pintu Lintas Batas (PLB).

Sedangkan pada tahun 2017 capaian dari indikator kinerja sasaran terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 14.039.799 kunjungan atau sebesar 93,60%, dari target yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 15.000.000 wisatawan mancanegara. Adapun hal yang menyebabkan tidak tercapainya target wisatawan mancanegara adalah terjadinya erupsi Gunung Agung di Bali. Bencana alam ini memberikan dampak yang cukup signifikan mengingat Bali masih menjadi destinasi utama untuk pariwisata Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan jumlah

wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016 dan 2015, terlihat meningkat.

Gambar 4-11
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2015
Sampai Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan diolah

Grafik diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2012 adalah sebesar 8.044.462 kunjungan. Pada tahun 2013 kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 0,09% menjadi 8.802.129 kunjungan. Pada tahun 2014 pencapaian kunjungan wisatawan asing meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan total jumlah kunjungan sebesar 9.435.441. Kemudian jumlah kunjungan wisatwan asing pada tahun 2015 adalah sebesar 10.230.775 kunjungan. Pencapaian jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2015 tercatat sebagai rekor tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa perayaan keagamaan, progam wisata sejarah, perayaan budaya dan seni, bahkan pergelaran fashion yang di gelar di Indonesia adalah faktor penyebabnya.

Menurut Puskompublik Kemenpar musim liburan hari raya Imlek yang dirayakan pada 19 Februari 2015 mendorong meningkatnya kunjungan

wisatawan mancanegara. Sejumlah *event* turut membawa dampak positif pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015. Di antaranya, peluncuran wisata sejarah Jalur Samudera Cheng Ho (JSC) di Batam, Gebyar Imlek Fair 2015 di Medan, Pasar Imlek Semawis 2015 di Semarang, Holi Color Festival 2015, Festival of Love 2015 di Jakarta, maupun Indonesia Fashion Week 2015 di Jakarta.

Tahun 2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 11.519.275 kunjungan atau mengalami peningkatan 12,59 persen dari tahun sebelumnya. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 ini salah satu penyebabnya adalah sejak diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke 169 negara pada tahun 2015. Apabila dilihat dari asal negara, wisatawan asing terbanyak berasal dari Tiongkok, yakni 1,43 juta. Pertumbuhan kunjungan dari Tiongkok itu diperkirakan karena ada pembukaan penerbangan langsung Tiongkok dari dan menuju Sulawesi Utara. Peringkat kedua ditempati wisman asal Singapura sebanyak 1,42 juta, dan Australia 1,18 juta. Selain itu, ada pula Malaysia dengan jumlah wisman 1,18 juta dan Jepang sebanyak 468,11 ribu.

Sejauh ini, sebagian besar wisatawan mancanegara masih melakukan kunjungan melalui pintu-pintu masuk utama Indonesia. Rinciannya, terdapat 10,57 juta kunjungan melalui 19 pintu utama, sedangkan diluar pintu utama sebanyak 948,99 ribu kunjungan. Lonjakan kunjungan terjadi di pintu utama Entikong, Kalimantan Barat yaitu sebesar 113,23 persen. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat, pencapaian tersebut masih

dibawah target Kementerian Pariwisata yaitu 12 juta kunjungan pada tahun 2016.

Selama tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 14.039.799 kunjungan atau naik 21,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mananegara pada tahun 2016. Negara asal wisatawan mancanegara mengalami perubahan. Posisi pertama ditempati oleh Singapura dengan jumlah 17,70 persen atau 202.969 dari 1,147 juta. Kedua ditempati oleh Malaysia dengan jumlah 13,48 persen atau 154.640 wisman, ketiga dari Australia sebesar 7,66 persen atau 74.968 wisman, dan India sebesar 4,68 persen atau 53.628 wisman. Sebelumnya, wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Tiongkok, namun pada tahun 2017 Tiongkok menempati posisi keempat karena pemerintah Tiongkok menghimbau dan memberika *warning* karena letusan Gunung Agung di Bali, tetapi ini hanya sementara saja.

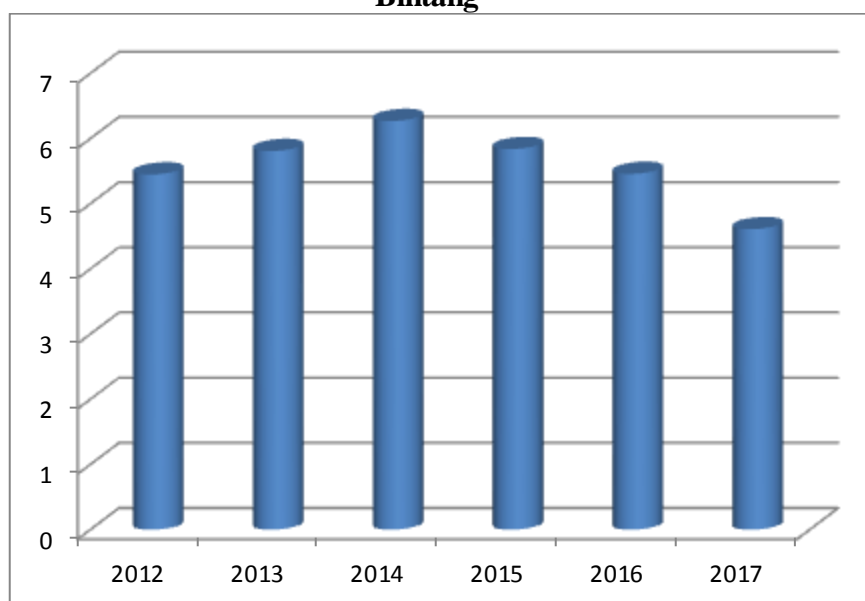
4.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi yang Mendukung Pariwisata Pasca Diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Perkembangan ekonomi pariwisata di Indonesia dapat dinilai dari beberapa indikator ekonomi yang mendukung sektor pariwisata. Beberapa indikator tersebut seperti rata-rata lama menginap, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Devisa Pariwisata, Laju pertumbuhan restoran, Jumlah penyediaan akomodasi, Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, dan beberapa indikator lainnya.

Berikut ini perkembangan beberapa indikator yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia untuk melihat bagaimana keadaan sektor pariwisata dalam 6 tahun terakhir.

1. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara

Gambar 4-12
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing Pada Hotel Bintang dan Non-Bintang



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan diolah

Berdasarkan data menunjukkan bahwa, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non-bintang sebelum diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) terus meningkat. Dimana pada tahun 2012 adalah rata-rata 5,45 malam, tahun 2013 adalah 5,81 malam, dan tahun 2014 adalah 6,27 malam. Setelah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), rata-rata lama menginap tamu asing atau wisman pada hotel bintang dan non-bintang di 27 provinsi terjadi penurunan yaitu rata-rata 5,84 malam selama tahun 2015. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,46 malam, terjadi penurunan 0,38 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. kemudian pada tahun 2017 terjadi juga penurunan sebesar 0,85 poin atau turun menjadi 4,61

malam. Menurunnya lama menginap tamu asing di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017 disebabkan karena banyaknya destinasi wisata baru di Indonesia yang membuat para tamu asing tersebut tidak ingin berlama-lama menginap di satu tempat saja. Munculnya destinasi baru ini juga disertai dengan perbaikan aksesibilitas baik pembangunan fasilitas bandara, sarana dan prasarana di destinasi, dan memperkuat karakteristik budayanya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tabel 4-2
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Bukan Pajak	351.804,70	354.804,90	398.590,50	255.628,48	261.976,30	260.242,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844,00	226.406,20	240.848,30	100.971,87	64.901,90	95.643,10
Bagian Laba BUMN	30.798,00	34.025,60	40.314,40	37.643,72	37.133,20	41.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	73.458,50	69.671,90	87.746,80	81.697,43	117.995,40	85.057,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	21.704,30	24.648,20	29.681,00	35.315,46	41.945,90	38.541,40

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp351.804,70 triliun. Pada tahun 2013 Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami peningkatan menjadi Rp354.751,90 triliun. Kemudian pada tahun 2014 PNBP juga meningkat sebesar Rp398.590,50 triliun. Selama tiga tahun sebelum kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) diberlakukan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus meningkat. Sedangkan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut

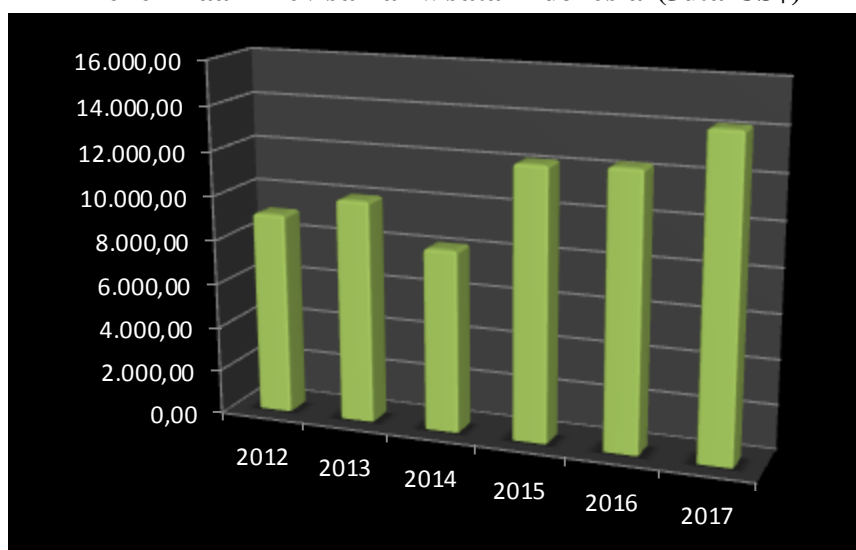
realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menurun dimana pada tahun 2017 adalah sebesar Rp260.242,10 triliun. Meskipun menurun, capaian ini berada di atas target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Realisasi penerimaannya mencapai Rp308,4 triliun atau 118,5 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan sebesar 17,7 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan realisasi PNBPN tahun 2016 yang sebesar Rp.262 triliun atau 106,9 persen dari target APBNP 2016. Capaian tahun 2016 juga lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar 256 triliun. Peningkatan PNBPN yang terjadi di tahun 2017 berasal dari berbagai sektor, dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) antara lain pencapaian harga minyak yang melebihi estimasi di APBN-P serta pendapatan batubara yang beberapa bulan belakangan mengalami tren kenaikan seiring dengan peningkatan ICP. Realisasi penerimaan SDA tercatat sebesar Rp110,9 triliun atau mencapai 116,05% dari target APBNP 2017. Kementerian/Lembaga (K/L) juga turut menyumbang PNBPN yang cukup signifikan tahun 2017 ini, salah satunya dari lelang frekuensi yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang meningkat pesat ini juga merupakan dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kalimantan Tengah sepanjang 2017. Kunjungan ke TNTP sepanjang 2017 tercatat sebanyak 24.693 wisatawan. Itu terdiri 14.933 wisatawan mancanegara (wisman), dan 9.760 wisatawan nusantara (wisnus). Akibat peningkatan kunjungan itu, PNBPN dari destinasi wisata yang pernah dikunjungi tokoh semacam Bill Clinton dan Julia Robert, ini pun mencapai angka Rp. 6.040.157.500 sepanjang 2017. Angka ini

memecahkan rekor tertinggi sebelumnya, yaitu Rp 4.670.125.461 pada 2016. PNBPN dari Tanjung Puting masuk sepuluh besar tertinggi di antara satuan kerja (balai taman nasional dan balai konservasi sumber daya alam) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Penerimaan Devisa Pariwisata

Gambar 4-13
Penerimaan Devisa Pariwisata Indonesia (Juta US\$)



Sumber: Kementerian Pariwisata (www.kemenpar.go.id) dan diolah

Berdasarkan grafik diatas, penerimaan devisa pariwisata sebelum adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) cenderung lebih rendah dibandingkan tahun setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Pada tahun 2012 penerimaan devisa pariwisata tercatat sebesar 9.120,90 juta US\$. Pada tahun 2013 penerimaan devisa tersebut meningkat menjadi 10.054,10 juta US\$. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan dimana penerimaan devisa pariwisata adalah sebesar 8.221,30 juta US\$. Pada tahun 2015, kebijakan Bebas Visa Kunjungan mulai diberlakukan, namun pembebasan visa kepada wisatawan mancanegara tersebut tidak menyebabkan penurunan dari devisa pariwisata, melainkan penerimaan devisa pada tahun 2015 meningkat dan

menciptakan devisa sebesar 12.225,90 juta US\$. Peningkatan penerimaan devisa ini tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, tetapi juga bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan yaitu sebesar US\$ 1.190. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa pariwisata diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan. Kemudian pada tahun 2016 penerimaan devisa pariwisata sebesar 12.366,90 Juta US\$ atau meningkat sebesar 1,15 persen dari tahun 2015. Peningkatan devisa pariwisata ini juga seiring dengan diberlakukan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke 169 negara. Sehingga wisatawan mancanegara bisa lebih lama berwisata di Indonesia. Semakin lama wisatawan mancanegara berada di Indonesia maka semakin besar pengeluarannya.

Sedangkan pada tahun 2017, penerimaan devisa pariwisata juga meningkat menjadi 14,216 Juta US\$. Peningkatan jumlah penerimaan devisa tersebut dinilai oleh beberapa faktor:

a. Selisih Nilai Tukar Mata Uang Asing

Semakin banyaknya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia, maka akan semakin banyak pula konsepsi dalam bentuk rupiah yang akan dilakukan. Perbedaan selisih kurs jual dan beli mata uang asing tersebut turut menyumbang pada besarnya devisa pariwisata mancanegara.

b. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Besarnya jumlah wisman dan besarnya pengeluaran yang mereka keluarkan di Indonesia turut berpengaruh terhadap jumlah devisa pariwisata.

c. Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara sangat berpengaruh terhadap jumlah devisa yang diterima oleh negara.

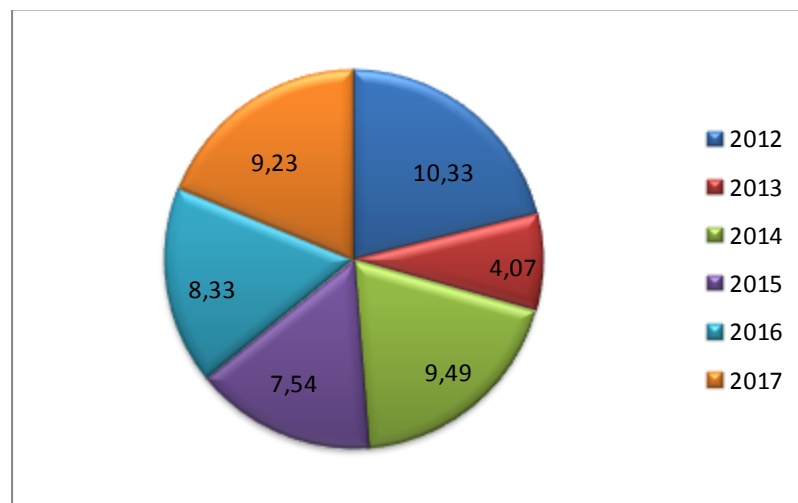
d. Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Semakin lama wisman tinggal di Indonesia, semakin besar devisa pariwisata yang dihasilkan oleh negara.

4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Restoran

Industri makanan dan minuman (mamin) nasional memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri makanan dan minuman nasional.

Gambar 4-14
Laju Pertumbuhan Usaha Restoran di Indonesia



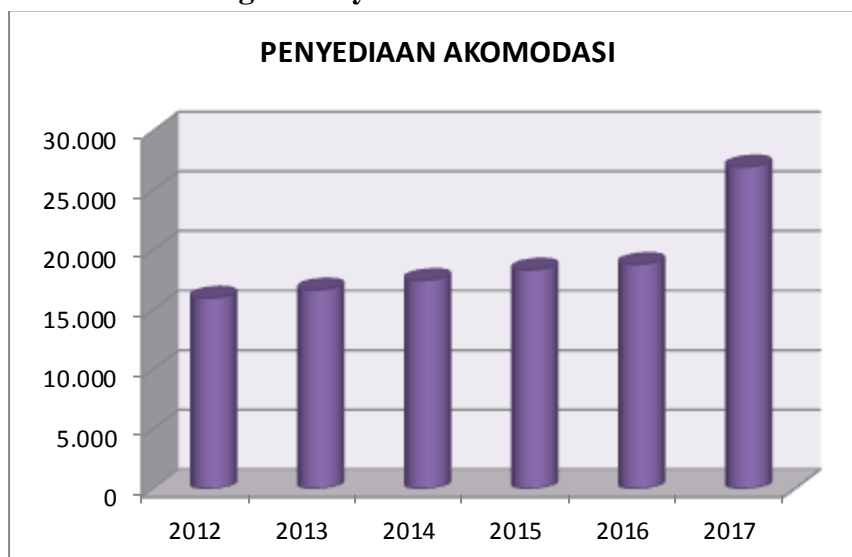
Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan Diolah

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2012 pertumbuhan restoran adalah sebesar 10,33 persen. Kemudian pada tahun 2013 pertumbuhan restoran mengalami penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 4,07 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan restoran kembali mengalami peningkatan sebesar 9,49 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan industri makan

minum nasional mencapai 7,54 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 5,21%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,71%. Pada tahun 2016 pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman tercatat hingga 8,33 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 hanya 5,02 persen. Naiknya sektor industri makanan dan minuman disebabkan tingginya investasi sektor tersebut pada 2016. Total nilai investasi sektor tersebut bahkan mencapai Rp61 triliun. Angka tersebut naik 41,86 persen jika dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp43 triliun. Sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 9,23% atau naik dari 2016 yang sebesar 8,46%. Selain itu kontribusi industri mamin ke PDB juga cukup besar. Industri makanan dan minuman kontribusi ke PDB non migas 34,33%.

5. Perkembangan Penyediaan Akomodasi

Gambar 4-15
Perkembangan Penyediaan Akomodasi di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan diolah

Berdasarkan data, jumlah penyediaan akomodasi dari tahun 2012 sampai 2017 terus meningkat. Adapun penyediaan akomodasi tahun 2012

sebanyak 15.998, tahun 2013 meningkat menjadi 16.685 unit. Kemudian tahun 2014 juga meningkat sebanyak 17,484 unit. Tidak ada peningkatan cukup besar yang terjadi selama 3 tahun sebelum kebijakan Bebas Visa Kunjungan diberlakukan. Setelah kebijakan bebas visa diberlakukan, penyediaan akomodasi di berbagai provinsi tetap meningkat. Peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar yaitu pada tahun 2015 sebanyak 18.353 unit, kemudian pada tahun 2016 juga meningkat menjadi 18.829 unit. Meskipun peningkatan jumlah usaha pariwisata terutama hotel dan akomodasi lainnya ini tidak terlalu besar, namun telah memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Akan tetapi pada tahun 2017, terjadi peningkatan yang lebih besar dibandingkan lima tahun sebelumnya yaitu sebanyak 27.000 unit. Berdasarkan publikasi Nesparnas Tahun 2017, salah satu usaha yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi, dengan distribusi sebesar 5,03%. Hotel berbintang rata-rata mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 92,3 orang dan pada usaha akomodasi lainnya sebanyak 8,1 orang (BPS, 2015).

4.2 Hasil Analisis Komparatif

A. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Analisis komparatif dilakukan untuk melihat perbedaan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), maka hipotesisnya sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan arus wisatawan mancanegara sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan arus wisatawan mancanegara sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-3
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara

		Mean	N
Pair 1	Jumlah Wisman Sebelum BVK	8.760.667,3333	3
	Jumlah Wisman Sesudah BVK	11.929.949,6667	3

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan mancanegara pada sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara dari 3 tahun sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan adalah sebesar 8.760.667,33 kunjungan. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia adalah sebesar 11.929.949,66 kunjungan.

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Jlh Wisman Sebelum BVK - Jlh Wisman Sesudah BVK	-3.169.282,33333	1.270.862,74804	33.732,94968	-6.326.280,41219	12.284,25448	-4.319	2	.050

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,050. Karena Sig = 0,05 maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan jumlah

wisatawan mancanegara sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara setelah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) meningkat dibandingkan sebelum adanya kebijakan BVK. Artinya dengan adanya kebijakan bebas visa, wisatawan merasa lebih mudah untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu kemajuan teknologi melalui promosi-promosi di media sosial wisatawan mancanegara bisa lebih mengenal bahwa destinasi wisata di Indonesia tidak hanya berada di wilayah Pulau Bali. Kementerian pariwisata sudah menetapkan 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan dalam meningkatkan sektor pariwisata, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi. Melalui kebijakan bebas visa, pemerintah terus mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut dengan cara memanfaatkan potensi lokal dan budaya dalam menarik minat wisatawan asing.

B. Lama Menginap Tamu Asing

Data lama menginap tamu asing digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata lama menginap wisman sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), maka dilakukan uji beda dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan rata-rata lama menginap tamu asing sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan rata-rata lama menginap tamu asing sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-4
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang

		Mean	N
Pair 1	Lama Menginap Sebelum BVK	5.3333	3
	Lama Menginap Sesudah BVK	4.6667	3

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap pada sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata lama menginap dari 3 tahun sebelum kebijakan BVK dilaksanakan adalah sebesar 5,33 malam atau selama 63,96 jam. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata lama menginap tamu asing adalah sebesar 4,66 malam atau 55,92 jam.

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Lama Menginap Sebelum BVK– Lama Menginap sesudah BVK	.66667	1.15470	.66667	-2.20177	3.53510	1.000	2	.423

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non bintang sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,423.

Maka disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non bintang sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah sama atau tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non bintang. Artinya wisatawan mancanegara tidak menghabiskan waktu yang lama pada tempat yang sama. Mereka lebih senang berpindah-pindah tempat wisata. Hal ini menunjukkan daerah tujuan wisata tidak hanya berfokus di pulau jawa maupun pulau bali saja yang menjadi tempat favorit bagi para wisatawan mancanegara.

C. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uji beda juga dilakukan untuk melihat perbedaan PNBP sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), maka hipotesisnya sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan PNBP sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan PNBP sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-5
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

		Mean	N
Pair 1	PNBP Sebelum BVK	368.382,37	3
	PNBP Sesudah BVK	259.282,29	3

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata PNBP dari 3 tahun sebelum kebijakan BVK dilaksanakan adalah sebesar Rp 368.382,37 Miliar Rupiah. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata PNBP adalah sebesar Rp 259.282,29 Miliar Rupiah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan setelah diberlakukannya kebijakan BVK.

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PNBP Sebelum BVK – PNBP Sesudah BVK	109.100,073	25.386,798	14.657,075	46.035,771	172.164,376	7.444	2	.018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil uji statistik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,018. Maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian jika dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Selama tiga tahun sebelum kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) diberlakukan,

PNBP terus meningkat. Sedangkan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menurun. Meskipun menurun, capaian ini berada di atas target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Peningkatan PNBP yang terjadi di tahun 2017 berasal dari berbagai sektor, dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) antara lain pencapaian harga minyak yang melebihi estimasi di APBNP serta pendapatan batubara yang beberapa bulan belakangan mengalami tren kenaikan seiring dengan peningkatan ICP.

D. Penerimaan Devisa Pariwisata

Penerimaan devisa digunakan untuk melihat perbedaan penerimaan devisa pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), maka dilakukan uji beda dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan penerimaan devisa pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan penerimaan devisa pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-6
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Devisa Pariwisata Indonesia

		Mean	N
Pair 1	Devisa Sebelum BVK	9.132,1000	3
	Devisa Sesudah BVK	12.936,2667	3

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata devisa pariwisata Indonesia pada sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata perolehan devisa sektor pariwisata dari 3 tahun sebelum kebijakan BVK dilaksanakan adalah sebesar 9.132,10 juta US\$. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata devisa dari sektor pariwisata adalah sebesar 12.936,26 juta US\$. Dari hasil diatas dapat terlihat bahwa setelah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia diberlakukan perolehan devisa pariwisata terus meningkat.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Devisa Sebelum BVK– Devisa Sesudah BVK	-3.804,16667	1.937,96863	1.118,88671	-8.618,34763	1.010,01430	-3.400	2	.077

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil uji statistik penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,077. Maka disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi penerimaan devisa Indonesia dari sektor pariwisata. Kebijakan bebas visa kunjungan diterapkan untuk

mendongkrak perolehan devisa dari sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Indonesia setelah diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan diklaim berada di atas pertumbuhan pariwisata dunia dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN. Pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara kompetitor Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oleh sebab itu penerimaan devisa pariwisata setelah kebijakan bebas visa mengalami peningkatan.

E. Pertumbuhan Restoran

Perbedaan pertumbuhan restoran sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dilihat dengan menggunakan data penyediaan makan dan minum, maka uji beda menggunakan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan pertumbuhan restoran sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan pertumbuhan restoran sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-7
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Pertumbuhan Restoran

Paired Samples Statistics			
		Mean	N
Pair 1	Restoran Sebelum BVK	7,9633	3
	Restoran Sesudah BVK	8,3667	3

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan restoran di Indonesia pada sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan restoran dari 3 tahun sebelum kebijakan BVK dilaksanakan adalah sebesar 9.132,10 juta US\$. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata pertumbuhan restoran adalah sebesar 12.936,26 juta US\$. Dari hasil diatas dapat terlihat bahwa setelah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia diberlakukan perolehan devisa pariwisata terus meningkat setelah diberlakukan kebijakan tersebut.

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	Df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Restoran Sebelum BVK– Restoran Sesudah BVK	-,40333	3,57150	2,06201	-9,27544	8,46877	-.196	2	.863

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik pertumbuhan restoran sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,863. Maka disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya pertumbuhan akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi pertumbuhan restoran di

Indonesia. Pada sisi industri makanan dan minuman (mamin) dinilai mampu menjadi instrumen yang berperan mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata per tahun, industri mamin tumbuh 9,5 persen, sedangkan ekonomi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pasca kebijakan BVK pertumbuhan industri makanan dan minuman semakin meningkat karna banyak kebutuhan pasar dari pertambahan jumlah wisman yang masuk ke Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, industri mamin nasional memiliki potensi untuk naik tingkat ke *industry* 4.0. Dengan naik level, industri mamin dalam negeri dapat mengembangkan inovasi dan teknologi terbaru melalui kemitraan dengan industri mamin dinegara-negara maju.

F. Jumlah Akomodasi

Penyediaan akomodasi meningkat jika dilihat dari data, namun untuk melihat perbedaan jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dilakukan uji beda dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

$H_0: b = 0$ (tidak ada perbedaan jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

$H_a: b \neq 0$ (ada perbedaan jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK)

Tabel 4-8
Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Akomodasi di Indonesia

Paired Samples Statistics

		Mean	N
Pair 1	Akomodasi Sebelum BVK	16.722,33	3
	Akomodasi Sesudah BVK	21.394,00	3

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata jumlah akomodasi pada sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia. Rata-rata jumlah akomodasi dari 3 tahun sebelum kebijakan BVK dilaksanakan adalah sebesar 16.722,33 unit. Sementara 3 tahun setelah diberlakukan kebijakan BVK rata-rata jumlah akomodasi yang ada di Indonesia adalah sebesar 21.394,00 unit. Jelas terlihat perbedaan jumlah akomodasi sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan lebih rendah sesudah diberlakukan kebijakan BVK. Berdasarkan hasil di atas dapat terlihat bahwa setelah kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia diberlakukan perolehan devisa pariwisata terus meningkat setelah diberlakukan kebijakan tersebut.

Paired Samples Test

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Akomodasi Sebelum BVK– Akomodasi Sesudah BVK	-4.671,667	4.196,642	2.422,932	-15.096,703	5.753,370	-1.928	2	.194

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK diketahui bahwa nilai Sig sebesar 0,194. Maka disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah sama atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi jumlah akomodasi di Indonesia. Pertumbuhan bisnis hotel nonbintang memicu iklim persaingan tidak sehat di sektor perhotelan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kamar hotel nonbintang pada 2014, 2015, dan 2016 masing-masing mencapai 273.391 unit, 289.727 unit, dan 294.169 unit dengan pertumbuhan sekitar 3,7% per tahun. Sementara itu, jumlah kamar hotel berbintang pada 2014, 2015, dan 2016 masing-masing mencapai 195.886 unit, 217.474 unit, dan 233.007 unit dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun. . Menjamurnya hotel nonbintang dipicu oleh semakin tingginya kebutuhan wisatawan yang ingin mengurangi biaya wisata dari segi transportasi dan akomodasi

4.3 Pembahasan

Jumlah wisatawan mancanegara setelah diberlakukan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) meningkat dibandingkan sebelum adanya kebijakan BVK. Artinya dengan adanya kebijakan bebas visa, wisatawan merasa lebih mudah untuk berkunjung ke Indonesia. Selain itu kemajuan teknologi melalui promosi-promosi di media sosial wisatawan mancanegara bisa lebih mengenal bahwa destinasi wisata di Indonesia tidak hanya berada di wilayah Pulau Bali. Kementerian pariwisata sudah menetapkan 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan dalam meningkatkan sektor pariwisata, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi. Melalui kebijakan bebas visa, pemerintah terus mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut dengan cara memanfaatkan potensi lokal dan budaya dalam menarik minat wisatawan asing.

Arus wisatawan yang paling banyak meningkat setelah diberlakukan kebijakan BVK yaitu Borobudur dan Labuan Bajo. Salah satu faktor penting terkait peningkatan wisatawan mancanegara di daerah tersebut disebabkan oleh peningkatan infrastruktur dan konektivitas aksesibilitas. Sebagai contoh, adanya pembukaan rute penerbangan langsung oleh maskapai Garuda dari Jakarta ke Labuan Bajo di akhir tahun 2016. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yaitu mencakup kegiatan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis terkait dengan pengembangan aksesibilitas (darat, udara, dan laut), pengembangan atraksi (wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan), serta pengembangan

amenitas. Meskipun demikian, arus wisatawan mancanegara paling banyak masih di dominasi oleh pulau jawa. Hal ini dikarenakan infrastruktur di luar pulau jawa yang masih minim.

Berdasarkan negara-negara yang diberikan bebas visa, wisatawan asing paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok dengan jumlah wisman sebanyak 215.159 kunjungan. Kemudian, di posisi kedua Malaysia dengan 210.075 kunjungan. Posisi ketiga ditempati oleh Timor Leste dengan jumlah 169.761 kunjungan. Posisi keempat ditempati oleh Singapura dengan 152.984 kunjungan. Posisi kelima ditempati oleh Australia dengan 115.127 kunjungan.

Dalam PDB, sektor pariwisata dapat terdiri dari beberapa lapangan usaha, antara lain penyediaan akomodasi dan makan-minum, transportasi dan perhubungan, namun di PDB yang dihitung adalah nilai tambah ekonomi tanpa memilah-milah apakah penghasil devisa atau bukan. Berdasarkan hasil uji rata-rata lama menginap mengalami penurunan. Artinya wisatawan mancanegara tidak menghabiskan waktu yang lama pada tempat yang sama. Mereka lebih senang berpindah-pindah tempat wisata. Hal ini menunjukkan daerah tujuan wisata tidak hanya berfokus di pulau jawa maupun pulau bali saja yang menjadi tempat favorit bagi para wisatawan mancanegara.

Kebijakan bebas visa kunjungan diterapkan untuk mendongkrak perolehan devisa dari sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Indonesia setelah diberlakukan kebijakn bebas visa kunjungan diklaim berada di atas pertumbuhan pariwisata dunia dan pertumbuhan pariwisata kawasan ASEAN. Pertumbuhan pariwisata Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara kompetitor Malaysia,

Singapura, dan Thailand. Oleh sebab itu penerimaan devisa pariwisata setelah kebijakan bebas visa mengalami peningkatan.

Dilihat dari penyediaan akomodasi, Pertumbuhan bisnis hotel nonbintang dikhawatirkan memberi tekanan terhadap bisnis hotel berbintang, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kamar hotel nonbintang pada 2014, 2015, dan 2016 masing-masing mencapai 273.391 unit, 289.727 unit, dan 294.169 unit dengan pertumbuhan sekitar 3,7% per tahun. Sementara itu, jumlah kamar hotel berbintang pada 2014, 2015, dan 2016 masing-masing mencapai 195.886 unit, 217.474 unit, dan 233.007 unit dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun.

Pertumbuhan bisnis hotel nonbintang memicu iklim persaingan tidak sehat di sektor perhotelan. Pebisnis hotel berbintang yang beralih menggarap segmen nonbintang semakin banyak, sehingga membuat pemerintah semakin kesulitan mengelola data dan memungut pajak. Menjamurnya hotel nonbintang dipicu oleh semakin tingginya kebutuhan wisatawan yang ingin mengurangi biaya wisata dari segi transportasi dan akomodasi. Sebelumnya, rata-rata pengeluaran wisatawan di Indonesia terbagi atas 40% untuk kebutuhan transportasi, 40% untuk akomodasi, dan 20% untuk jalan-jalan, makan, serta membeli oleh-oleh. Sekarang mereka sudah menjadi smart traveler, dan mencoba mengefisienkan biaya perjalanan serta memperbesar alokasi dana untuk jalan-jalan. Prospek bisnis perhotelan di Indonesia juga mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir akibat maraknya bisnis Airbnb dan homestay. Wisatawan lebih memilih menginap di homestay karena selain murah, mereka bisa merasakan bagaimana tinggal di daerah karena berbaur dengan penduduk lokal.

Dilihat dari industri makanan dan minuman (mamin) dinilai mampu menjadi instrumen yang berperan mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor makan minum skala besar diharapkan memperkuat pendalaman struktur dan rantai nilai industrinya melalui kemitraan strategis dengan sektor skala kecil dan menengah. potensi industri mamin dalam negeri cukup besar, bahkan pertumbuhannya hampir dua kali dari pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata per tahun, industri mamin tumbuh 9,5 persen, sedangkan ekonomi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pasca kebijakan BVK pertumbuhan industri makanan dan minuman semakin meningkat karna banyak kebutuhan pasar dari penambahan jumlah wisman yang masuk ke Indonesia. Seiring perkembangan teknologi, industri mamin nasional memiliki potensi untuk naik tingkat ke *industry* 4.0. Dengan naik level, industri mamin dalam negeri dapat mengembangkan inovasi dan teknologi terbaru melalui kemitraan dengan industri mamin dinegara-negara maju.

Kemudian jika dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Selama tiga tahun sebelum kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) diberlakukan, PNBP terus meningkat. Sedangkan setelah diberlakukannya kebijakan tersebut realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menurun. Meskipun menurun, capaian ini berada di atas target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Peningkatan PNBP yang terjadi di tahun 2017 berasal dari berbagai sektor, dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) antara lain pencapaian harga minyak yang melebihi estimasi di APBN-P serta pendapatan batubara yang beberapa bulan belakangan mengalami tren kenaikan seiring dengan peningkatan ICP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara jumlah wisatawan mancanegara sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK.
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang dan non bintang sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).
4. Tidak ada perbedaan antara penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebelum dan sesudah diberlakukan kebijakan BVK.
5. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan restoran sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan BVK tidak mempengaruhi pertumbuhan restoran di Indonesia.
6. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah akomodasi sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

5.2 Saran

1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberlakukan negara Indonesia kepada 169 negara berdampak kepada menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini berasal dari penerbitan visa Indonesia. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengalihkan PNBP ke sektor lain, termasuk pariwisata. Misalnya, PNBP dari harga tiket kebun binatang atau PNBP lain di sektor wisata.
2. Kebijakan bebas visa merupakan salah satu cara termudah untuk meningkatkan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat menggenjot devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata dan diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca jasa. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan.
3. Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, Sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan merupakan negara yang tidak menyumbang jumlah wisatawan yang signifikan ke Indonesia. Sehingga penambahan negara-negara tersebut menjadi tidak relevan dengan tujuan untuk menggenjot jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Untuk itu perubahan strategi dibutuhkan dengan lebih memfokuskan energi dan sumber daya yang ada saat ini

dengan melakukan diplomasi dan promosi pariwisata Indonesia ke negara-negara yang telah menyumbang atau berpotensi menyumbang jumlah wisatawan yang signifikan untuk datang ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Penerimaan Devisa*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha di Indoensia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018
- Badan Pusat Statistik. *Kunjungan Wisatawan Mancanegara di indonesia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Tingkat Penghuni Kamar Hotel Bintang dan Non-Bintang*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Akomodasi*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Pertumbuhan Usaha Restoran dan Kafe di Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Ringkasan APBN*. www.bps.go.id. Diakses tanggal 31 Oktober 2018.
- Badan Narkotika Nasional. *Kasus Narkoba di Indonesia*. www.bnn.go.id. Diakses tanggal 05 Desember 2018.
- David, R., Branden, Sembiring, C., & Pertiwi, D. (2002). *Ekonometrika*. New York: Erlanggis.
- Edgel, S. (2008). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow*. Burlington: Elsevier.

- Ilham, M. (2017). Pengaruh Pendapatan Terhadap Agregat Consumption di Kota Medan. *Ekonomikawan*, 12(2), 15-28.
- Machmud, A. (2014). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mcintyre, G. (1993). *Sustainable Tourism Development Guide for Local Planner*. Spair: C.H.N. Meditheek.
- Muljadi, A.J. (2009). *Keparwisataaan dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salvatore, D. (2004). *Theory and Problem of Micro Economic Theory, 3rd Edition*. Jakarta: Erlangga.
- Sinaga, S. (2010). Potensi dan Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Kertas Karya* , 12.
- Sitepu, P. A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Yoeti, Oka A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, Oka A. (1985). *Penuntun Praktis Pariwisata Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Yoeti, Oka A. (1997). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya.

LAMPIRAN

DATA DAN HASIL

PENGOLAHAN E-VIEWS 10

Lampiran 1. Data Panel Indikator Ekonomi yang Mendukung Pariwisata

Data Panel Sektor Ekonomi yang Mendukung Pariwisata

INDIKATOR EKONOMI	TAHUN	SEBELUM	TAHUN	SESUDAH
LAMA MENGINAP (MALAM)	2012	5,45	2015	5,84
LAMA MENGINAP (MALAM)	2013	5,81	2016	5,46
LAMA MENGINAP (MALAM)	2014	6,27	2017	4,61
PNBP (MILIAR RUPIAH)	2012	351.804,70	2015	255.628,48
PNBP (MILIAR RUPIAH)	2013	354.751,90	2016	261.976,30
PNBP (MILIAR RUPIAH)	2014	398.590,50	2017	260.242,10
DEVISA (JUTA US\$)	2012	9.120,90	2015	12.225,90
DEVISA (JUTA US\$)	2013	10.054,10	2016	12.366,90
DEVISA (JUTA US\$)	2014	8.221,30	2017	14.216,00
JUMLAH WISMAN (JIWA)	2012	8.044.462	2015	10.230.775
JUMLAH WISMAN (JIWA)	2013	8.802.129	2016	11.519.275
JUMLAH WISMAN (JIWA)	2014	9.435.411	2017	14.039.799
RESTORAN (%)	2012	10,33	2015	7,54
RESTORAN (%)	2013	4,07	2016	8,33
RESTORAN (%)	2014	9,49	2017	9,23
AKOMODASI (UNIT)	2012	15.998	2015	18.353
AKOMODASI (UNIT)	2013	16.685	2016	18.829
AKOMODASI (UNIT)	2014	17.484	2017	27.000

Lampiran 2. Hasil Uji Beda Sampel Berpasangan

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Jumlah Wisman Sebelum BVK	8.760.667,3333	3	696.400,80593	402.067,19277
	Jumlah Wisman Sesudah BVK	11.929.949,6667	3	1.937.435,47493	1.118.578,89299

Paired Samples Test

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Jlh Wisman Sebelum BVK – Jlh Wisman Sesudah BVK	-3.169.282,33333	1.270.862,74804	33.732,94968	-6.326.280,41219	12.284,25448	-4.319	2	.050

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Lama Menginap Tamu Asing pada Hotel Bintang dan Non Bintang

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Lama Menginap Sebelum BVK	5.3333	3	.57735	.33333
	Lama Menginap Sesudah BVK	4.6667	3	.57735	.33333

Paired Samples Test

		Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Lama Menginap Sebelum BVK – Lama Menginap sesudah BVK	.66667	1.15470	.66667	-2.20177	3.53510	1.000	2	.423

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 PNBP Sebelum BVK	368.382,37	3	26.202,481	15.128,009
PNBP Sesudah BVK	259.282,29	3	3.280,949	1.894,257

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PNBP Sebelum BVK – PNBP Sesudah BVK	109.100,073	25.386,798	14.657,075	46.035,771	172.164,376	7.444	2	.018

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Devisa Pariwisata Indonesia

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Devisa Sebelum BVK	9.132,1000	3	916,45133	529,11342
	Devisa Sesudah BVK	12.936,2667	3	1.110,52164	641,15997

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Devisa Sebelum BVK– Devisa Sesudah BVK	-3.804,16667	1.937,96863	1.118,88671	-8.618,34763	1.010,01430	-3.400	2	.077

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Pertumbuhan Restoran

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Restoran Sebelum BVK	7,9633	3	3,39778	1,96171
	Restoran Sesudah BVK	8,3667	3	,84560	,48821

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Restoran Sebelum BVK– Restoran Sesudah BVK	-.40333	3,57150	2,06201	-9,27544	8,46877	-.196	2	.863

Uji Beda Sampel Berpasangan Variabel Jumlah Akomodasi di Indonesia

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Akomodasi Sebelum BVK	16.722,33	3	743,703	429,377
Akomodasi Sesudah BVK	21.394,00	3	4.860,769	2.806,366

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Akomodasi Sebelum BVK– Akomodasi Sesudah BVK	-4.671,667	4.196,642	2.422,932	-15.096,703	5.753,370	-1.928	2	.194



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 28/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tomy Puji Setiawan
NPM : 1505180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi
Pariwisata di Indonesia
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Tomy Puji Setiawan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 28/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/8/11/2018

Nama Mahasiswa : Tomy Puji Setiawan
NPM : 1505180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -
Tanggal Pengajuan Judul : 8/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....
..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Nama Dosen pembimbing : Lailan Safina Hsb. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN
SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 03 Desember 2018

Dosen Pembimbing

(Dra. Lailan Safina HSB M, Si)

Nama : Tomy Puji Setiawan
NPM : 1505180023
Konsentrasi : -
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen~~/Ekonomi
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 20...12...2018
Pembuat Pernyataan



Tomy Puji Setiawan

Tomy Puji Setiawan

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



UMSU

Unggul Cendek, Terpercaya

Di lingkungan ini agar disebarkan
dan dipertanggungjawabkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 75^{Py}/TGS/II.3-AU/UMSU-05/P/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : TOMY PUJI SETIAWAN
N P M : 1505180023
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pariwisata Di Indonesia

Dosen Pembimbing : **Dra.LAILAN SAFINA HSB,M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 03 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Awwal 1440 H
03 Desember 2019 M

Dekan 

IL JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : TOMY PUJI SETIAWAN
N.P.M : 1505180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM
MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI
INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
23/11/2018	Proposal diterima	Ku	
26/11/2018	- Perbaiki latar belakang - Identifikasi masalah dan masalah penelitian	Lu	
03/12/2018	- Sempurnakan lagi latar belakang - Perbaiki kerangka konseptual penelitian - Perbaiki definisi operasional	Lu	
08-12-2018	- Perbaiki pengantar dan kempiran - Perbaiki jenis penelitian - Perbaiki daftar pustaka - lihat koreksi yg ada.	Lu	
11-12-2018	Telah selesai diperikow dan acc untuk seminar proposal	Lu	

Pembimbing Proposal

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Medan, 13 Desember 2018

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini **TOMY PUJI SETIAWAN** tanggal Jumat, 28 Desember 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan **TOMY PUJI SETIAWAN** menerangkan bahwa :

N a m a : TOMY PUJI SETIAWAN
N .P.M. : 1505180023
Tempat / Tgl.Lahir : Magelang, 09 Januari 1997
Alamat Rumah : AL-Falah V, Kel Glugur Darat I
Judul Proposal : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Batasan - Rumusan Tujuan banyak revisi
Bab II	Urutan Teori harus sesuai dgn judul Skripsi
Bab III	Def. Operasional harus byk di revisi
Lainnya
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jumat, 28 Desember 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pemanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext. 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 28 Desember 2018* menerangkan bahwa:

Nama : TOMY PUJI SETIAWAN
N .P.M. : 1505180023
Tempat / Tgl.Lahir : Magelang, 09 Januari 1997
Alamat Rumah : AL-Falah V, Kel Glugur Darat I
Judul Proposal : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.*

Medan, Jumat, 28 Desember 2018

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.

Pembanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : DR. PRAWIDYA HARIANI, S.E
Dosen Pembimbing : Dra. LAILAN SAFINA HSB M.Si

Nama Mahasiswa : TOMY PUJI SETIAWAN
NPM : 1505180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Proposal : KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM
MENINGKATKAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA DI
INDONESIA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
14-02-2019	- Penulisan bab 4 teori, buku pan dean - Jumlah datanya lagi untuk melihat kondisi sebelum dan sekarang	} Lr	
26-02-2019	- Urutannya satu per satu - Setiap pengujian, lanjutkan dengan analisis yg mas dalam.	} Lr	
01-03-2019	- Buat abstraksi, kesimpulan nyaman - Buat dft 15, del	}	
11-03-2019	Telah selesai dipiknik dan sejajar untuk proses awal jumbuh	} Lr	

Dosen Pembimbing

Dra. LAILAN SAFINA HSB M.Si

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui /Disetujui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

DR. PRAWIDYA HARIANI, S.E